



**DOKUMEN
PERENCANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA**

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA NANJUNG MEKAR
TAHUN 2024 - 2029





Dokumen RPJM Desa ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa dan rencana program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, serta disusun berdasarkan usulan/gagasan dari tiap-tiap RW di masing-masing dusun di Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Usulan kegiatan dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 5 (lima) bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4). Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen RPJM Desa dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana pengawasan bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Nanjung Mekar. Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen RPJM Desa ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penyusunan RPJM Desa ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen RPJM Desa tepat waktu.

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen RPJM Desa ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Nanjung Mekar , 02 Januari 2024
Kepala Desa Nanjung Mekar

KIKI KOSASIH, S.E.



DAFTAR ISI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA NANJUNG MEKAR
TAHUN 2024 - 2029

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	01
1.1. Latar belakang	01
1.2. Maksud dan Tujuan.....	02
1.3. Dasar Hukum	03
1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa.....	06
BAB II. PROFIL DESA	11
2.1. Sejarah Desa	11
2.2. Kondisi Umum Desa.....	12
2.3. Kondisi Sosial Budaya Desa	14
2.4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	19
BAB III. VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN	21
3.1. Visi	21
3.2. Misi.....	22
3.3. Arah Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	22
3.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bandung	24
3.5. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Nanjung Mekar	29
BAB IV. PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA.....	32
4.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	33
4.2. Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa	42
4.3. Jadwal Musyawarah Dusun/Kelompok.....	36
4.4. Pelaksanaan dan Rekapitulasi Gagasan Kegiatan Musyawarah Dusun/Kelompok	37
4.5. Analisis Hasil Rekomendasi Indeks Desa Membangun (IDM)	51
4.6. Analisis Capaian SDGs Desa	64
4.7. Analisis Peta Jalan SDGs Desa	72
4.8. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa.....	75
4.9. Penyelenggaraan Musyawarah Desa	76
4.10. Penyelenggaraan Sosialisasi RPJM Desa	77
BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.....	78
6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa.....	78
6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan.....	80
6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	84
6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	85
6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya	87
BAB VII. PENUTUP.....	88
7.1. Kesimpulan	88
7.2. Saran-Saran	88



DAFTAR TABEL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA NANJUNG MEKAR
TAHUN 2024 - 2029

Tabel 1.	Daftar Nama Kepala Desa	11
Tabel 2.	Luas Wilayah Desa	12
Tabel 3.	Luas Wilayah Berdasarkan Pembagian Dusun.....	13
Tabel 4.	Batas Wilayah Desa	14
Tabel 5.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin	14
Tabel 6.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	15
Tabel 7.	Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Tabel 8.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharaan	17
Tabel 9.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	18
Tabel 10	Visi Misi Kabupaten Bandung	25
Tabel 11	Arahan Kebijakan dalam Rentang Tahun Perencanaan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026	25
Tabel 12	Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Berbasis Tematik (Bandung Bedas Manunggal)	28
Tabel 13	Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa Nanjung Mekar Tahun 2024 – 2029	30
Tabel 14	Tahapan Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Rancaekek	32
Tabel 15	Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	33
Tabel 16	Rapat Tim Penyusun RPJM Desa	34
Tabel 17	Rencana Kerja Tindak Lanjut (RTKL)	35
Tabel 18	Jadwal Musyawarah Dusun/Kelompok.....	36
Tabel 19 - 32	Pelaksanaan dan Rekapitulasi Gagasan Kegiatan Dusun ...	37 – 50
Tabel 33	Penyelenggaraan Musrenbang Desa.....	75
Tabel 34	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	76
Tabel 22	Penyelenggaraan Sosialisasi RPJM Desa	77



Gambar 1 Tahapan Penyusunan RPJM Desa	6
Gambar 2. Luas Wilayah Desa	12
Gambar 3. Luas Wilayah Berdasarkan Pembagian Dusun.....	13
Gambar 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Gambar 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	15
Gambar 6 Tema Pembangunan Lima Tahunan Kabupaten Bandung.....	25
Gambar 7. Konsep Kebijakan Bandung Bedas Manunggal.....	28



LAMPIRAN

● ● RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
● ● **RPJM DESA NANJUNG MEKAR**
● ● **TAHUN 2024 - 2029**

1. Peraturan Desa Tentang RPJM Desa 2024 – 2029
2. SK Tim Penyusun RPJM Desa
3. Dokumen Visi, Misi dan Arah Kebijakan Kepala Desa
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Gambar Kalender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi Desa
8. Rancangan RPJM Desa
9. Dokumen Pokok Pikiran BPD
10. Berita Acara Kegiatan
11. Notulen Kegiatan
12. Daftar Hadir Musyawarah



BAB I PENDAHULUAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

RPJM DESA NANJUNG MEKAR

TAHUN 2024 - 2029

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Bagi Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalam melaksanakan pembangunan melalui tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan yang dimiliki menyusun perencanaan Pembangunan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJM Desa ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala



Desa. Oleh sebab itu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanat tersebut, maka Pemerintah Desa Nanjung Mekar berkewajiban menyusun RPJM Desa Tahun 2024 - 2029.

RPJM Desa Nanjung Mekar merupakan penjabaran visi, misi Kepala Desa terpilih. Penyusunan RPJM Desa berpedoman pada Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 MAKSUD

RPJM Desa Nanjung Mekar tahun 2024 – 2029 disusun dengan maksud:

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten.



1.2.1. TUJUAN

RPJM Desa Nanjung Mekar tahun 2024 - 2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa yang kolaboratif.

1.3. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan RPJM Desa Nanjung Mekar didasarkan pada beberapa landasan, antara lain :

- 1) Landasan Ideologis Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Landasan Operasional, yaitu peraturan perundangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen RPJMDes Desa Nanjung Mekar tahun 2024 - 2029 ini adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - h. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja



Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- s. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- t. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- v. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- w. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung (Iembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010).



- z. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014).
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016).
- bb. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung.
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
2. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
3. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
4. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
5. Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
6. Penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.



Sumber: Permendes Nomor 21 Tahun 2020

Gambar 1
Tahapan Penyusunan RPJM Desa

1.4.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Setelah diadakan musyawarah internal pemerintah Desa dan BPD serta perwakilan tokoh masyarakat Kepala Desa menunjuk Ketua Tim Penyusun untuk melaksanakan kegiatan



penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2024 – 2029, Ketua Tim Penyusun yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa berhak menentukan anggota untuk membantu dalam rangka penyusunan Dokumen RPJM Desa Nanjung Mekar.

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa ini menjadi tahapan yang cukup penting untuk mendapatkan kualitas dari Dokumen RPJM Desa tersebut. Tim Penyusun harus mampu menterjemahkan Visi dan Misi Kepala desa yang sudah menjadi Visi dan Misi Desa selama 6 (enam) tahun kedepan.

Susunan Tim RPJMDesa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RPJMDesa terdiri dari :

1. Pembina dijabat oleh Kepala Desa
2. Ketua dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian
3. Sekretaris ditunjuk oleh ketua tim
4. Anggota, yang berasal dari unsur perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat desa lainnya.

Tim penyusun RPJM Desa bertugas:

- a. Menyusun rancangan RPJM Desa; dan
- b. Memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa.

1.4.2. Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dilakukan dengan cara:

a). Mempelajari dan Mengkaji Peta Jalan SDGs Desa

Tim Penyusun RPJM Desa mempelajari dan mengkaji peta jalan SDGs yang disusun oleh kepala Desa dengan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Sasaran SDGs Desa;
- b. Kondisi objektif pencapaian SDGS Desa;
- c. Permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
- d. Potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan
- e. Rancangan program dan/atau kegiatan pembangunan Desa.



b). Mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa

Mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa merupakan proses mencari dan menggali informasi, mencermati dan mendata untuk menyelaraskan arah kebijakan Desa selama 6 (enam) tahun dengan kebijakan kabupaten.

1.4.3. Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa disusun berdasarkan:

- a. Sistem Informasi Desa; dan
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa.

Rancangan RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
- b. tipologi Desa sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
- d. lokasi program dan/atau kegiatan;
- e. perkiraan volume;
- f. sasaran/manfaat;
- g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
- h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
- i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar Desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa dan disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

1.4.4. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk Membahas Rancangan RPJM Desa

Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musrenbang Desa diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyelenggara musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah kepala Desa;



- b. musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat Desa;
- c. kepala Desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat; dan
- d. warga Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh kepala Desa berhak menghadiri Musrenbang Desa.

Pembahasan dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa. Diskusi kelompok secara terarah membahas:

- a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
- b. pokok pikiran BPD;
- c. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;
- d. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
- e. rancangan RPJM Desa.

Hasil kesepakatan dalam Musrenbang pembahasan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa dan disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD. Selanjutnya Kepala Desa menginformasikan berita acara kepada masyarakat Desa melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

1.4.5. Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Membahas, Menyepakati dan Menetapkan RPJM Desa

Pada tahapan Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Membahas, Menyepakati dan Menetapkan RPJM Desa, dalam tahapan ini BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa.

Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana meliputi:

- a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
- b. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah Desa; dan
- c. pengesahan dokumen RPJM Desa.



- d. Berita acara musyawarah Desa ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.

Pengesahan dokumen RPJM Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.

1.4.6. Penyelenggaraan Sosialisasi RPJM Desa kepada Masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui Media dan Forum Pertemuan Desa

Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa tentang Peraturan Desa tentang RPJM Desa melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya. Sosialisasi dan dapat dilakukan melalui:

- a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan desa;
- b. Sistem Informasi Desa;
- c. papan informasi Desa; dan
- d. media lain sesuai kondisi Desa.



BAB II PROFIL DESA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA NANJUNG MEKAR
TAHUN 2024 - 2029

2.1. Sejarah Desa

Desa Nanjung Mekar terbentuk pada tahun 1984, hasil pemekaran wilayah dari Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dengan dasar pertimbangan pemekaran:

1. Luas Desa Cangkuang sudah layak untuk diadakan pemekaran, mengingat jumlah penduduk sudah terlalu padat, yang berdampak pada pelayanan masyarakat kurang maksimal, dan
2. Tuntutan aspirasi atau usulan masyarakat.

Pada masa persiapan pembentukan desa, telah dilaksanakan beberapa kali rapat para tokoh masyarakat untuk menentukan nama dan tempat kantor pemerintahan desa, pada akhir rapat disepakati nama desa yaitu Desa Nanjung Mekar yang berarti beruntung berkembang, menggambarkan masyarakatnya yang subur, makmur dalam sektor perekonomiannya dan lokasi kantor desa disepakati di Kampung Babakan.

Berikut daftar nama-nama kepala Desa Nanjung Mekar sejak tahun 1984:

Tabel 1
Daftar Nama Kepala Desa

NO.	TAHUN	KEPALA DESA	KETERANGAN
1	1984 - 1990	H. Rusyana Sulaeman	Definitif
2	1990 - 1996	H. Rusyana Sulaeman	Definitif
3	1996 - 2001	H. Rusyana Sulaeman	Definitif
4	2001 - 2006	Rusmana	Definitif
5	2006	Ohan Abdul Kohar	Penjabat Kepala Desa
6	2006 - 2007	Edi D. Andaya	Definitif
7	2007 – 2010	Dedi Saepul Hadi, SH.	Pelaksana Tugas
8	2010 – 2016	Dedah Faridah	Definitif
9	2016 – 2017	Oji Syaeroji, S.STp.	Penjabat Kepala Desa
10	2017	Asep Setiawan, S.Sos.	Penjabat Kepala Desa
11	2017 – 2023	Dedah Faridah	Definitif
12	2023	Meti Nurwati	Pelaksana Tugas
13	2023 - Sekarang	Kiki Kosasih, S.E.	Definitif

Sumber: Pemerintahan Desa Nanjung Mekar Tahun 2023



2.2. Kondisi Desa

2.2.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Desa Nanjung Mekar merupakan salah satu Desa di Kecamatan Rancaekek yang terletak di sebelah timur wilayah Kabupaten Bandung, dengan orbitasi:

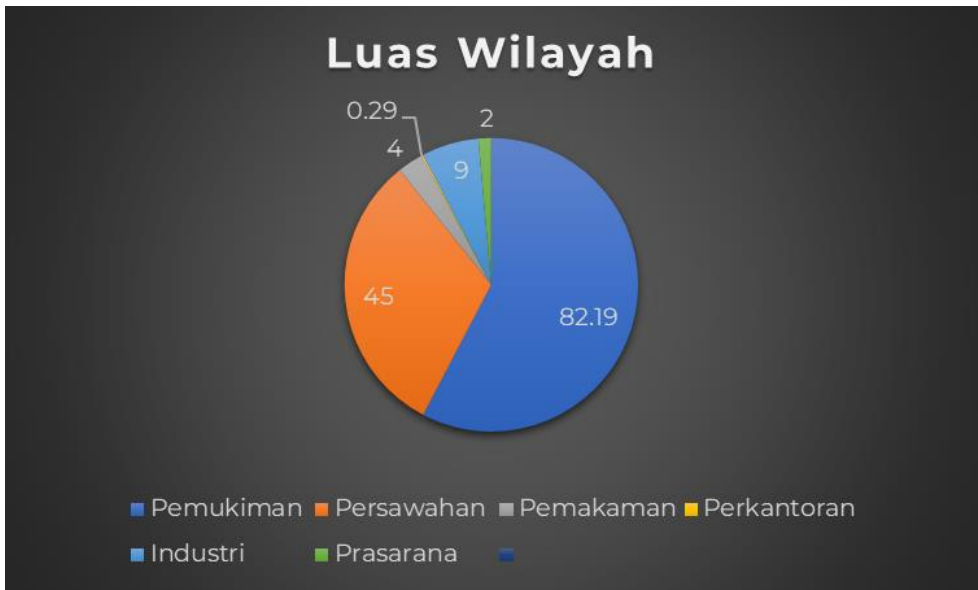
- Jarak ke Kecamatan : 6 Km
- Jarak ke Kabupaten : 49 Km
- Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 31 Km
- Jarak ke Ibu Kota Negara : 173 Km

Secara geografis Desa Nanjung Mekar terletak pada Koordinat Lintang (Latitude) -6.970665, Lintang Utara 107.818708, Lintang Selatan -6.969316, Koordinat Bujur (Longitude) 107.808479, ketinggian tanah dari permukaan laut 600 - 668 m, dengan topografi dataran rendah dan suhu udara rata-rata 28-29 °c. Sedangkan luas dan batas wilayah administratif Desa Nanjung Mekar dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut:

Tabel 2
Luas Wilayah Desa

Luas Desa	:	142,483 Ha
Luas lahan pemukiman	:	82,193 Ha
Luas lahan persawahan	:	45 Ha
Luas lahan pemakaman umum	:	4 Ha
Luas lahan perkantoran	:	0,29 Ha
Luas lahan industri	:	9 Ha
Luas Prasarana Umum lainnya	:	2 Ha

Sumber: Pemerintah Desa Nanjung Mekar Tahun 2023



Sumber: Sumber: Pemerintah Desa Nanjung Mekar Tahun 2023

Gambar 2
Luas Wilayah Desa

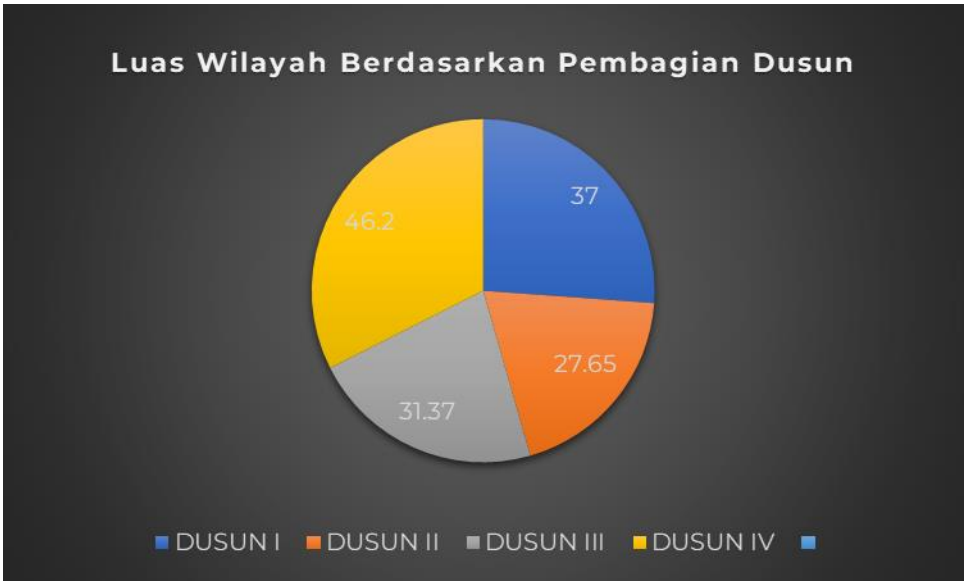


Luas wilayah berdasarkan pembagian Dusun di Desa Nanjung Mekar dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 3
Luas Wilayah Berdasarkan Pembagian Dusun

NO.	DUSUN	RW	JUMLAH RT	Luas (Ha)
1	DUSUN I	01	3	13,233
		02	5	14,53
		06	4	9,5
2	DUSUN II	03	4	9,05
		04	4	8,7
		11	3	9,9
3	DUSUN III	05	3	6,7
		09	3	10,15
		10	4	8,12
		14	7	6,4
4	DUSUN IV	07	4	14,67
		08	4	15,41
		12	4	8,22
		13	3	7,9
JUMLAH		14	55	142,483

Sumber: Pemerintah Desa Nanjung Mekar Tahun 2023



Sumber: Pemerintah Desa Nanjung Mekar Tahun 2023

Gambar 3
Luas Wilayah Desa Berdasarkan Pembagian Dusun



Batas wilayah administratif Desa Nanjung Mekar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Batas Wilayah Desa

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Desa Sindangpakuon, Desa Suka Dana dan Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.
Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.

Sumber: Pemerintahan Desa Nanjung Mekar Tahun 2023

2.3. Kondisi Sosial Budaya Desa

Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya:

1. **Kondisi Demografis/Kependudukan,** berdasarkan data Pemerintah Desa Nanjung Mekar pada tahun 2023 jumlah Penduduk Desa 11.951 Jiwa, berjenis Kelamin Laki laki = 5.982 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan = 5.969 Jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	5.982	50,05%
2.	Perempuan	5.969	49,95%
Total		11.951	100,00%

Sumber : Data Pemerintah Desa Nanjung Mekar 2023

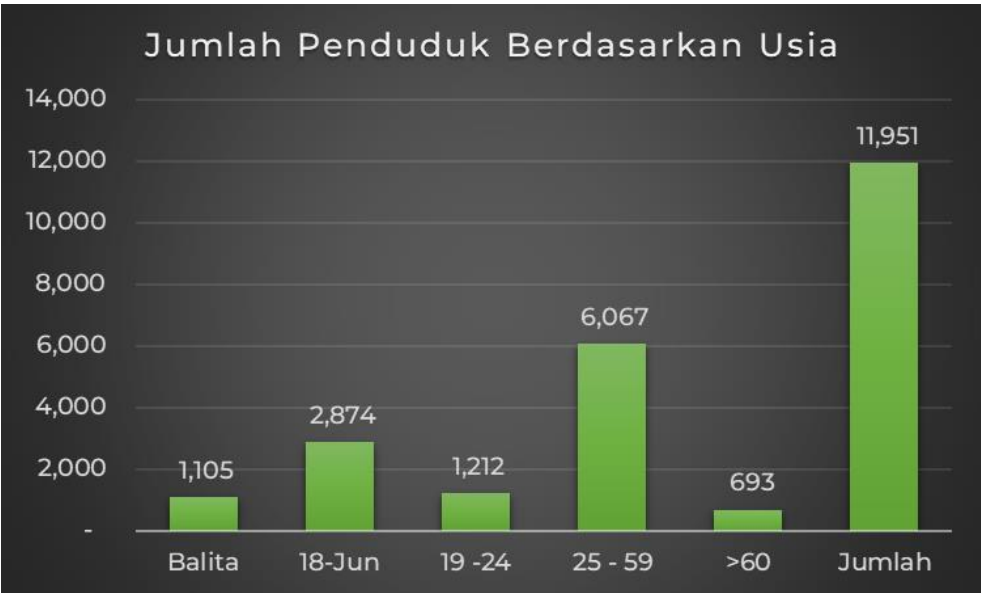


Sumber : Data Pemerintah Desa Nanjung Mekar 2023

Gambar 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 6			
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia			
No.	Usia (Tahun)	Jumlah	Prosentase
1.	Balita	1.105	09,25%
2.	06 - 18	2.874	24,05%
3.	19 -24	1.212	10,14%
4.	25 - 59	6.067	50,77%
5.	>60	693	05,80%
Jumlah		11.951	100,00%

Sumber : Data Pemerintah Desa Nanjung Mekar 2023



Sumber : Data Pemerintah Desa Nanjung Mekar 2023

Gambar 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia



2. **Kondisi Kesehatan Masyarakat**, salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai.
3. **Pendidikan**, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indakator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreatiftas.

Tabel 7

Jumlah Penduduk Tamat sekolah berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Tidak / Belum Sekolah	1.381	00,00%
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	1.177	00,00%
3.	Tamat SD/ Sederajat	573	00,00%
4.	Masih SLTP/Sederajat	669	00,00%
5.	SLTP/Sederajat	1.345	00,00%
6.	Masih SLTA/Sederajat	752	00,00%
7.	SLTA / Sederajat	4.027	00,00%
8.	Diploma I/II	679	00,00%
9.	Diploma III	392	00,00%
10.	Diploma IV/Strata I	923	00,00%
11.	Strata II	31	00,00%
12.	Strata III	2	00,00%
JUMLAH		00,00%

Sumber : Data Pemerintah Desa Nanjung Mekar 2023

4. **Mata Pencaharian**, dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Nanjung Mekar, memungkinkan mata pencaharian sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.



Tabel 8
Jumlah Penduduk berdasarkan Mata pencaharian

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Belum/Tidak Bekerja	1.122	00,00%
2.	Mengurus Rumah Tangga	1.276	00,00%
3.	Pelajar/Mahasiswa	2.856	00,00%
4.	Pensiunan	84	00,00%
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	106	00,00%
6.	Kepolisian RI (Polri)	16	00,00%
7.	TNI	9	00,00%
8.	Perdagangan	64	00,00%
9.	Petani/Perkebunan	100	00,00%
10.	Pengusaha	12	00,00%
11.	Konstruksi	4	00,00%
12.	Karyawan Swasta	1.056	00,00%
13.	Karyawan BUMN	12	00,00%
14.	Karyawan Honorer	21	00,00%
15.	Buruh Harian Lepas	1.419	00,00%
16.	Buruh Tani/Perkebunan	98	00,00%
17.	Pembantu Rumah Tangga	18	00,00%
18.	Tukang Batu	0	00,00%
19.	Tukang Kayu	56	00,00%
20.	Tukang Las/Pandai Besi	12	00,00%
21.	Tukang Jahit	52	00,00%
22.	Mekanik	24	00,00%
23.	Juru Masak	14	00,00%
24.	Dosen	2	00,00%
25.	Guru	90	00,00%
26.	Bidan	10	00,00%
27.	Perawat	20	00,00%
28.	Sopir	25	00,00%
29.	Pedagang	553	00,00%
30.	Perangkat Desa	15	00,00%
31.	Wiraswasta	1.445	00,00%
32.	Satpam	81	00,00%
33.	Dokter	2	00,00%
34.	Lainnya	220	00,00%
JUMLAH		10.894	00,00%

Sumber : Data Pemerintah Desa Nanjung Mekar 2023

5. **Kesejahteraan Masyarakat**, dengan berkembangnya jumlah penduduk di Desa Nanjung Mekar secara otomatis dituntut



bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program – program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BSP, PKH, dll dan Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.

6. **Agama**, dalam perspektif agama, masyarakat di desa Nanjung mekar termasuk masyarakat yang homogen, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat desa Nanjung Mekar mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam di desa Nanjung Mekar sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

Tabel 9

Jumlah Penduduk berdasarkan agama

No.	Agama	Jumlah	Prosentase
1.	Islam	11.707	98%
2.	Katholik	140	1,17%
3.	Kristen	77	0,64%
4.	Hindu	9	0,08%
5.	Budha	18	0,15%
JUMLAH		11.951	100%

Sumber : Data Pemerintah Desa Nanjung Mekar Tahun 2023

7. **Budaya**, Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat desa Nanjung Mekar masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan agama islam, hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat desa Nanjung Mekar adalah agama Islam, Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang banyak dipengaruhi oleh ritual ritual agama Islam dan perilaku orang tua terdahulu.



2.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nanjung Mekar Tahun 2023

1. Pemerintahan Desa

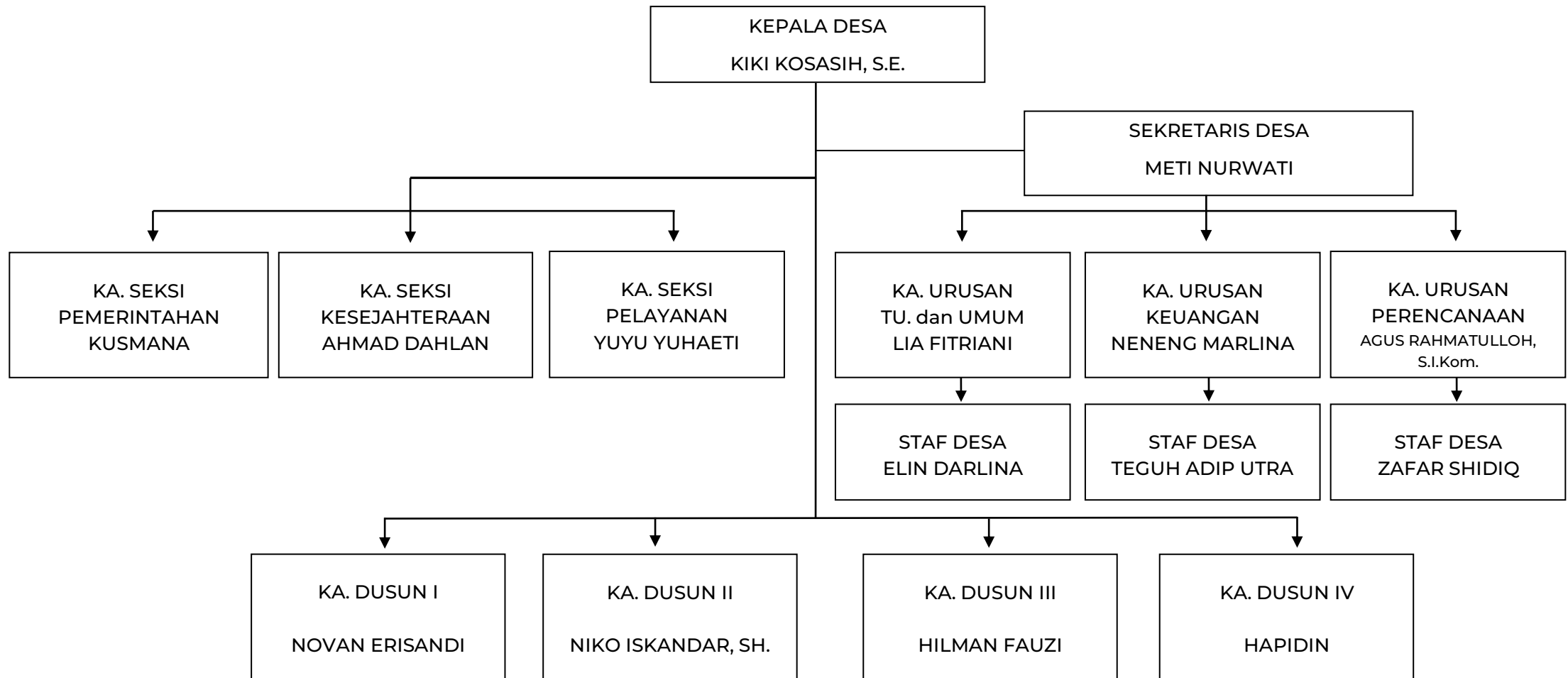
NO.	NAMA	JABATAN
1.	Kiki Kosasih, S.E.	Kepala Desa
2.	Meti Nurwati	Sekretaris Desa
3.	Kusmana	Kasi Pemerintahan
4.	Ahmad Dahlan	Kasi Kesra
5.	Yuyu Yuhaeti	Kasi Pelayanan
6.	Agus Rahmatulloh, S.Kom.I.	Kaur Perencanaan
7.	Lia Fitriani	Kaur Umum dan TU
8.	Neneng Marlina	Kaur Keuangan
9.	Novan Erisandi	Kepala Dusun 01
10.	Niko Iskandar, SH.	Kepala Dusun 02
11.	Hilman Fauzi	Kepala Dusun 03
12.	Hapidin	Kepala Dusun 04
13.	Elin Darlina	Staf Desa
15.	Teguh Adi Putra	Staf Desa
16.	Zafar Shidiq	Staf Desa

2. Badan Permusyawaratan Desa

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Muhammad Amin	Ketua
2.	Enang Muslim	Wakil Ketua
3.	Saripudin	Sekretaris
4.	E. Ratna Suminar, S.Pd.	Anggota
5.	Sukirman	Anggota
6.	Kurniawan	Anggota
7.	Idang Mulyana	Anggota



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA NANJUNG MEKAR
KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2023





BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA NANJUNG MEKAR
TAHUN 2024 - 2029

3.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan lokal Desa.

Visi Desa Nanjung Mekar adalah “Terwujudnya Desa Cerdas (*Smart Village*) dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Nanjung Mekar yang MUDA (Maju, Unggul, Disiplin dan Amanah)”.

Pernyataan visi mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Desa Nanjung Mekar dan seluruh Lembaga Desa dalam merealisasikan pembangunan desa secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu ;

1. Terwujudnya adalah upaya dan peran pemerintah desa dalam mewujudkan Desa Nanjung Mekar yang MUDA (Maju, Unggul, Disiplin dan Amanah)
2. Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya yang dapat diakses, dikembangkan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
3. Desa Cerdas (*Smart Village*) adalah upaya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Nanjung Mekar untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat .
4. Maju adalah kemampuan dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan untuk meningkatkan daya saing desa.
5. Unggul adalah kemampuan menciptakan kreativitas dan inovasi dalam program/kegiatan.
6. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Amanah adalah menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan tugas pemerintahan di Desa Nanjung Mekar.



3.2. MISI

Misi adalah langkah-langkah, tahapan-tahapan atau suatu cara yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menjabarkan atau menjelaskan agar dapat mewujudkan visi dari apa yang akan dikerjakannya.

Misi Desa Nanjung Mekar sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Efektif sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Cerdas (*Smart Governance*).
2. Melaksanakan Pembangunan Desa yang partisipatif, sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Cerdas (*Smart Development*).
3. Membina Masyarakat Desa yang berdaya guna sebagai upaya mewujudkan Masyarakat Cerdas (*Smart Community*).
4. Memberdayakan masyarakat yang kolaboratif sebagai upaya Mewujudkan Pemberdayaan Cerdas (*Smart Empowerment*).

3.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjelaskan bahwa SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui sistem informasi Desa.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang terdiri dari 17 poin utama dan 4 pilar untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan upaya dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan. terdapat 4 pilar yang telah mencakup 17 poin agenda SDGs;



1. Pilar Pembangunan Sosial

Pilar ini mencakup poin (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, dan (5) Kesenjangan Gender. Pada intinya, bertujuan tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar ini mencakup poin (7) Energi Bersih dan Terjangkau, (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, (10) Berkurangnya Kesenjangan, dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Pada intinya, bertujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan.

3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pilar ini mencakup poin (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, (11), Kota dan Pemukiman Layak, (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, (13) Penanganan Perubahan Iklim, (14) Ekosistem Laut, dan (15) Ekosistem Darat. Pada intinya, bertujuan tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.

4. Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar ini mencakup poin (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat. Pada intinya, bertujuan terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan:

1. Desa Tanpa Kemiskinan;
2. Desa Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;



9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Prioritas SDGs Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa. Pencapaian tujuan SDGs Desa diukur dengan melakukan evaluasi laju SDGs Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa.

Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa dilakukan oleh kepala Desa dengan melibatkan masyarakat Desa. Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana menjadi dasar bagi tim penyusun RPJM/RKP Desa dalam menyusun rancangan RPJM/RKP Desa. Sistem Informasi Desa digunakan untuk menyusun arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dan program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa untuk pencapaian tujuan SDGs Desa.

Pembangunan yang berkualitas membutuhkan data atau sistem informasi yang berkualitas, agar tujuan pembangunan berkelanjutan bisa tercapai. SDGs Desa akan menghasilkan data berkualitas yang menjadi target dan indikator mencapai pembangunan yang berkualitas.

3.4. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 menjadi bahan atau rujukan dalam proses pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa. Visi Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 10
Visi dan Misi Kabupaten Bandung

Visi	Misi
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS)	<div>1. Membangkitkan Daya Saing Daerah</div> <div>2. Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata</div> <div>3. Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan</div> <div>4. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan</div> <div>5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah</div>



Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021upaten Bandung, 2021

Gambar 6
Tema Pembangunan Lima Tahunan Kabupaten Bandung

Tabel 11
Arahan Kebijakan dalam Rentang Tahun Perencanaan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026

Arahan Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1 Membangkitkan Daya Saing Daerah					
Penumbuhan pusat-pusat distribusi wilayah yang sesuai standar *					
Fasilitasi Sumber Daya Industri di sentra industri					
Fasilitasi iklim usaha industri yang berkelanjutan					
Revitalisasi manajemen data base industri, usaha mikro dan koperasi					
Penatausahaan penyelenggaraan panas bumi					
Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM-nya					



Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi *					
Pengembangan simpul pangan regional dan lokal					
Perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani dan keluarga petani*					
Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan					
Pengembangan perbenihan perikanan strain unggulan					
Pengembangan kualitas hidup ikan perairan					
Pengembangan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan					
Penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam rangka penciptaan citra pariwisata yang memiliki karakter budaya Kabupaten Bandung *					
Peningkatan pengelolaan potensi alam dan budaya daerah dalam menjadi atraksi wisata baru yang berkelanjutan *					
Pengembangan simpul inovasi dan kreatif sebagai wadah berkreasi dan penciptaan akses pasar produk ekonomi kreatif					
Optimalisasi daya tarik objek wisata melalui pengembangan kebudayaan sunda *					
Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya Daerah sebagai peluang investasi					
Peningkatan kemudahan berusaha di Kabupaten Bandung sebagai daya tarik investasi					
Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal *					
Misi 2: Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata					
Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global *					
Menurunkan angka kelahiran murni *					
Pemanfaatan pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan					
Peningkatan kualitas layanan pendidikan yang mendukung persiapan industri 4.0 *					
Peningkatan standar kualitas layanan yang lebih adaptif dan kreatif dalam perubahan isu-isu global					
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pemerataan pelayanan kesehatan *					
Peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar kebutuhan*					
Meningkatkan kapasitas pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang kesehatan reproduksi					
Misi 3: Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang					



menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan					
Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan kualitas air, udara, dan tutupan lahan daerah *					
Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan infrastruktur daerah *					
Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program dalam pengelolaan pembangunan berbasis risiko bencana *					
Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap data, informasi dan program untuk Meningkatkan Ketahanan Pemberdayaan Masyarakat Desa *					
Misi 4: Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan					
Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik *					
Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian pembangunan *					
Pembentukan BUMD serta peningkatan akuntabilitas kinerja BUMD					
Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip					
Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN					
Peningkatan kapasitas APIP					
Digitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan *					
Optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan *					
Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah					
Menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis					
Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala lingkungan					
Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah					
Peningkatan pemerataan bantuan sosial bagi masyarakat yang tepat sasaran *					
Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja *					
Meningkatkan perlindungan pekerja					
Peningkatan pelatihan kepada angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi berbasis 4.0					
Peningkatan kualitas layanan pelaporan dan perlindungan untuk kasus kekerasan perempuan dan anak *					
Pengembangan simpul pangan regional dan lokal *					

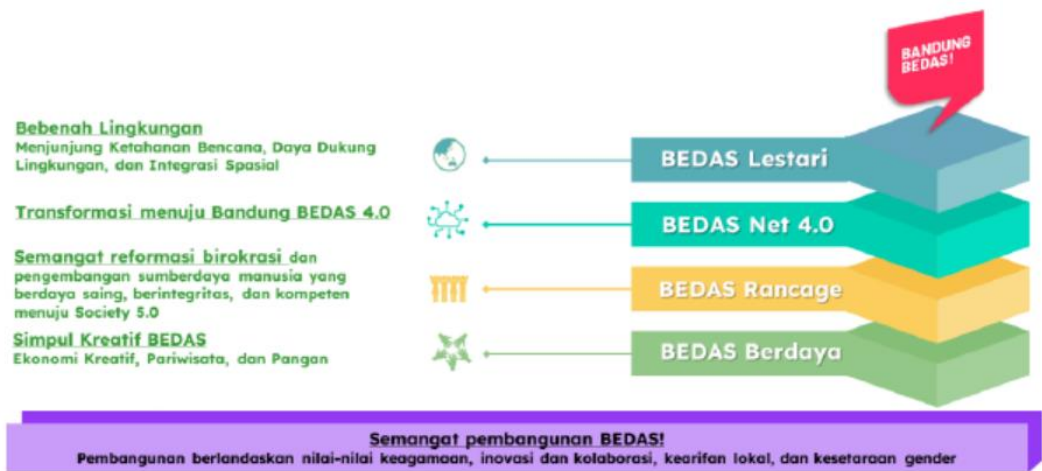
Keterangan: *)Termasuk program strategis Bupati

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



Tabel 12
Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Berbasis Tematik
(Bandung Bedas Manunggal)

No.	Tema	Lapisan Pembangunan
1	Kearifan lokal, yang diterjemahkan menjadi fokus Semangat Pembangunan BEDAS;	Semangat Pembangunan BEDAS mencakup semangat pembangunan yang mendasari konsep kebijakan Bandung Bedas Manunggal. Semangat pembangunan berupaya mendorong pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, inovasi dan kolaborasi, kearifan lokal dan kesetaraan gender.
2	Pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing, yang diterjemahkan menjadi focus BEDAS Berdaya;	BEDAS Berdaya merupakan manifestasi simpul kreatif BEDAS yang terdiri dari 3 (tiga) tema yang dinilai strategis untuk pembangunan Kabupaten Bandung, yakni Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Pangan.
3	Reformasi birokrasi, yang diterjemahkan menjadi fokus BEDAS Rancage;	BEDAS Rancage, mencakup semangat reformasi birokrasi dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bandung. Pembenahan human capital di lingkungan pemerintahan dan di kalangan masyarakat pada umumnya berupaya mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, berintegritas dan kompeten menuju perwujudan Society 5.0.
4	Transformasi digital, yang diterjemahkan menjadi fokus BEDAS Net 4.0; dan	BEDAS Net 4.0, yakni upaya-upaya pemerintah untuk melakukan transformasi digital yang menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah.
4	Pembangunan berkelanjutan, yang diterjemahkan menjadi fokus BEDAS Lestari.	BEDAS Lestari , merupakan konsepsi pembangunan daerah berbasis mikro DAS. Dalam hal ini, penyelenggaraan pembangunan berbasis mikro DAS menjunjung adanya plafon ekologis dalam pembangunan sehingga pembangunan tidak hanya untuk mengejar nilai-nilai ekonomi semata namun juga turut berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Terdapat 3 (tiga) plafon ekologis yang dijunjung dalam konsepsi BEDAS Lestari, yakni Ketahanan Bencana, Daya Dukung Lingkungan dan Integrasi Spasial.



Gambar 7
Konsep Kebijakan Bandung Bedas Manunggal
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2021



3.5. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA NANJUNG MEKAR

Arah Kebijakan Pembangunan Desa dalam RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Dengan memperhatikan:

- d. arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Tim Penyusun RPJM dan Kepala Desa Nanjung Mekar dalam menyusun arah kebijakan Desa khususnya dalam proses Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa harus berpedoman terhadap arah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang hingga peraturan-peraturan dari tingkat Pusat hingga Daerah.

Dengan mencermati, mengkaji hingga menyelaraskan visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan SDGs serta arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten bandung; konsep perencanaan pembangunan dalam upaya menjalankan arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Nanjung Mekar akan selaras dengan konsep Desa Cerdas (*Smart Village*) dalam mengimplementasikan visi misi, arah kebijakan SDGS serta arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten bandung yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026.

Konsep Desa Cerdas (*Smart Village*) adalah pendekatan pembangunan yang mendorong desa untuk melakukan transformasi pemanfaatan teknologi, dan ditujukan untuk peningkatan kualitas layanan dasar serta pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif, berkelanjutan melaluipeningkatan SDM.

Tabel 13
 Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa Nanjung Mekar
 Tahun 2024 – 2029

Visi: “Terwujudnya Desa Cerdas (Smart Village) dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Nanjung Mekar MUDA (Maju, Unggul, Disiplin dan Amanah)”.

Arah Kebijakan SDGs	Tema Pembangunan (Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026)	Bidang Pembangunan Desa	Misi Kepala Desa Nanjung Mekar (Dokumen Visi Misi Kepala Desa Nanjung Mekar 2024 – 2029)	Strategi	Program/Kegiatan Prioritas
Tujuan: 3, 9, 16, 17		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Efektif sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Cerdas (<i>Smart Governance</i>).	Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	Web/Aplikasi Kadesa: Digitalisasi Informasi dan Pelayanan Desa
Tujuan: 3, 4, 6, 7, 9, 11	1. Semangat Pembangunan BEDAS	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Melaksanakan Pembangunan Desa yang partisipatif, sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Cerdas (<i>Smart Development</i>).	Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Patisipatif dan Kolaboratif	Sarjana Desa, PKBM, Desa Wisata
Tujuan: 1, 5, 8, 10, 13	2. BEDAS Berdaya 3. BEDAS Rancage 4. BEDAS Net 4.0 5. BEDAS Lestari	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Membina Masyarakat Desa yang berdaya guna sebagai upaya mewujudkan Masyarakat Cerdas (<i>Smart Community</i>).	Peningkatan Pembinaan Masyarakat Desa yang berdaya guna, unggul dan berdaya saing	Balai Latihan Kerja
Tujuan: 2, 5, 10, 12, 14, 15		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Memberdayakan masyarakat yang kolaboratif sebagai upaya Mewujudkan Pemberdayaan Cerdas (<i>Smart Empowerment</i>).	Pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan lapangan kerja	Balai Latihan Kerja, Pasar Desa

Tim Penyusun RPJM Desa Nanjung Mekar 2024 - 2029

**VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN SDGs DESA DAN
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
DESA NANJUNG MEKAR TAHUN 2024 - 2029**



BEDAS **NET 4.0**

Transformasi Digital Menuju Desa BEDAS



VISI:

“Terwujudnya Desa Cerdas (*Smart Village*) dalam Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Nangjung Mekar yang MUDA (Maju, Unggul, Disiplin dan Amanah)”.





IV. PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Tahapan awal proses penyusunan RPJM Desa diawali dengan langkah Kepala Desa melakukan konsultasi dan koordinasi terkait agenda penyusunan dengan pihak Pemerintahan Kecamatan Rancaekek. Tahapan pelaksanaan Proses Penyusunan RPJM Desa selanjutnya dapat dilihat dari penjelasan yang disajikan dalam bentuk tabel kegiatan.

Tabel 14

Tahapan Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Rancaekek

Judul Kegiatan	Konsultasi dan Koordinasi Rencana Penyusunan RPJM Desa	
Tanggal	Rabu, 22 November 2023	
Unsur Peserta	<div><div>1. Kasi Pemerintahan Kec. Rancaekek</div><div>2. Staf Pemerintahan Kec. Rancaekek</div><div>3. Kepala Desa</div><div>4. BPD</div><div>5. LPMD</div><div>6. Perangkat Desa</div></div>	
Output	<div><div>- Daftar Hadir Peserta</div><div>- Notulen Rapat</div><div>- Arahkan dan Agenda Penyusunan RPJM Desa</div><div>- Agenda Musyawarah Dusun/Kelompok</div><div>- Analisis IDM, SDGs dan Penyelarasan RPJM dengan RPJMD Kabupaten</div></div>	

Dokumentasi





4.1. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA

Tabel 15

Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Judul Kegiatan	Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	
Tanggal	Kamis, 23 November 2023	
Unsur Peserta	<div>1. Kepala Desa</div> <div>2. BPD</div> <div>3. Pendamping Desa</div> <div>4. Perangkat Desa</div> <div>5. LPMD</div> <div>7. Bhabinkamtibmas</div> <div>8. Para Ketua RW dan RT</div> <div>9. Tokoh Masyarakat</div> <div>10. Tokoh Agama</div> <div>11. TP PKK</div>	
Output	<div>- Daftar Hadir Peserta Musyawarah</div> <div>- Notulen Rapat</div> <div>- SK Tim Penyusun RPJM Desa</div>	

Dokumentasi Kegiatan



4.2. **PENCERMATAN HASIL PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa bisa dilihat pada tabel-tabel kegiatan berikut:

Tabel 16

Rapat Tim Penyusun RPJM Desa

Judul Kegiatan	Rapat Tim Penyusun RPJM Desa
Tanggal, Waktu	Jum’at, 24 November 2023 13.00 – 17.30 WIB
Unsur Peserta	<div>1. Kepala Desa</div> <div>2. Tim Penyusun RPJM</div>
Output	<div>- Daftar Hadir Peserta Musyawarah</div> <div>- Notulen Rapat</div> <div>- Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) Tim RPJM</div> <div>- Pembagian Tugas</div> <div>1. Capaian IDM dan SDGs</div> <div>2. Penyelarasan RPJM dengan RPJMD Kabupaten</div> <div>3. Jadwal dan Pelaksanaan Musyawarah Dusun/Kelompok</div> <div>4. Jadwal Penyusunan, Musrenbang, Musdes dan Sosialisasi RPJM</div>

Dokumentasi





Tabel 17
Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)
Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2024 – 2029

NO.	Judul dan Agenda	Pelaksanaan	Tempat
1	Musyawarah Dusun/Kelompok Agenda: 1. Pemetaan Potensi dan masalah; 2. Pengkajian dan Pemeringkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan 3. Serap aspirasi/gagasan masyarakat.	27 November – 10 Desember 2023	Dusun/Kelompok/RW di Wilayah Desa Nanjung Mekar
2	Serap aspirasi/gagasan masyarakat dalam bentuk Formulir Online	11 – 15 Desember 2023	Google Form
	Link Formulir Online: https://forms.gle/A9A4ZStM3aUYmaxn6		
3	Penyusunan RPJM Desa	11 – 20 Desember 2023	Kantor/Aula Desa
4	Penyelenggaraan Musrenbang Desa Untuk Membahas Rancangan RPJM Desa	27 Desember 2023	Aula Desa
5	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Untuk Membahas, Menyepakati dan Menetapkan RPJM Desa	29 Desember 2023	Aula Desa
6	Penyelenggaraan Sosialisasi RPJM Desa Kepada Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Melalui Media Forum Pertemuan Desa	01 – 13 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none">- Wilayah Desa- Masyarakat Desa- Papan Informasi- Print Out- Website- Media Sosial

4.3. JADWAL MUSYAWARAH DUSUN/KELOMPOK

Tabel 18
Jadwal Musyawarah Dusun/Kelompok

No.	Pelaksanaan		Lokasi/Tempat
	Hari	Waktu	
1	Senin, 27 November 2023	15.00 – 19.00 WIB	Madrasah Al-Hikmah Dusun I - RW 01
2	Senin, 27 November 2023	19.30 – 19.00 WIB	Masjid Al Dusun I - RW 02
3	Selasa, 28 November 2023	15.30 – 18.00 WIB	Masjid Al Dusun II – RW 03
4	Selasa, 28 November 2023	19.00 – 22.00 WIB	Madrasah AL Dusun I – RW 06
5	Rabu, 29 November 2023	15.30 – 18.00 WIB	Masjid Al Dusun II – RW 04
6	Rabu, 29 November 2023	19.30 – 22.30 WIB	Madrasah Ar-Roja Dusun II – RW 11
7	Kamis, 30 November 2023	19.30 – 23.00 WIB	Masjid Al Dusun III – RW 09
8	Jum’at, 01 Desember 2023	15.30 – 18.00 WIB	Madrasah Al Dusun III – RW 10
9	Kamis, 07 Desember 2023	19.30 – 22.30 WIB	Madrasah Al Dusun IV – RW 12
10	Jum’at, 08 Desember 2023	15.30 – 18.00 WIB	Madrasah Al-Huda Dusun IV – RW 08
11	Jum’at, 08 Desember 2023	19.30 – 22.00 WIB	Masjid Al-Ikhlas Dusun IV – RW 13
12	Sabtu, 02 Desember 2023	15.30 – 18.00 WIB	Madrasah Kifayatul Azhar Dusun III – RW 05
13	Sabtu, 02 Desember 2023	19.30 – 22.00 WIB	Madrasah Umar Bin Khotob GPR Dusun III – RW 14
14	Minggu, 03 Desember 2023	19.30 – 22.30 WIB	Madrasah Al Dusun IV – RW 07

4.4. PELAKSANAAN DAN REKAPITULASI GAGASAN KEGIATAN MUSYAWARAH DUSUN/KELOMPOK

Tabel 19

Pelaksanaan dan Rekapitulasi Gagasan Kegiatan Musyawarah Dusun I RW 01

Judul Kegiatan	Musyawarah Dusun I RW 01	
Tanggal, Waktu	Senin, 27 November 2023 15.00 – 19.00 WIB	
Unsur Peserta	Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM, BPD, LPMD, Bhabibkamtibmas, Kadus, Ketua RW dan RT, PKK, Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda, Karta	
Output	Daftar Hadir Peserta Musyawarah, Notulen Rapat & Berita Acara, Pemetaan Potensi dan masalah, Pengkajian dan Pemeringkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan Serap aspirasi/gagasan masyarakat.	
Gagasan/Usulan Kegiatan	<div> <div>1. Pondasi Tanah Makam (TPT)</div> <div>2. Rabat Beton Jalan Gang</div> <div>3. Drainase</div> <div>4. Sarana Air Bersih</div> <div>5. MCK</div> <div>6. KantorRW</div> <div>7. Rutilahu</div> <div>8. Pelatihan Mekanik, Elektronik dan IT</div> <div>9. Bantuan Warga Miskin</div> <div>10. Modal UMKM</div> <div>11. Bantuan Guru Ngaji</div> <div>12. Bantuan Anak Yatim</div> <div>13. Bantuan Jompo</div> <div>14. Bantuan Sarpras Pendidikan dan Keagamaan</div> </div>	

Dokumentasi Kegiatan



Tabel 20

Pelaksanaan dan Rekapitulasi Gagasan Kegiatan Musyawarah Dusun I RW 02

Judul Kegiatan	Musyawarah Dusun I RW 02	
Tanggal, Waktu	Senin, 27 November 2023 19.30 – 22.00 WIB	
Unsur Peserta	Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM, BPD, LPMD, Bhabibkamtibmas, Kadus, Ketua RW dan RT, PKK, Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna	
Output	Daftar Hadir Peserta Musyawarah, Notulen Rapat & Berita Acara, Pemetaan Potensi dan masalah, Pengkajian dan Pemingkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan Serap aspirasi/gagasan masyarakat.	
Gagasan/Usulan Kegiatan	<div><div><div>1. Rutilahu</div><div>2. Sumber Air Bersih (SAB)</div><div>3. Pipanisasi Saluran Pembuangan</div><div>4. Rehab MCK</div><div>5. Peralatan Kebersihan (Roda dan Tong Sampah)</div></div><div><div>6. Pembangunan Gapura</div><div>7. Pembangunanna TPS</div><div>8. Keermur,</div><div>9. Alat Kesenian, Kendang</div><div>10. Bantuan Yatim</div><div>11. Bantuan Modal UMKM</div><div>12. Pelatihan Karang Taruna</div></div></div>	

Dokumentasi Kegiatan



Tabel 21

Pelaksanaan dan Rekapitulasi Gagasan Kegiatan Musyawarah Dusun II RW 03

Judul Kegiatan	Musyawarah Dusun II RW 03	
Tanggal, Waktu	Selasa, 28 November 2023 15.30 – 18.00 WIB	
Unsur Peserta	Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM, BPD, LPMD, Bhabibkamtibmas, Kadus, Ketua RW dan RT, PKK, Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna	
Output	Daftar Hadir Peserta Musyawarah, Notulen Rapat & Berita Acara, Pemetaan Potensi dan masalah, Pengkajian dan Pemingkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan Serap aspirasi/gagasan masyarakat.	
Gagasan/Usulan Kegiatan	<div><div><div>1. Perbaikan Jalan Gang</div><div>2. Pembuatan Gapura</div><div>3. Sumber Air Bersih (SAB)</div><div>4. Rutilahu</div><div>5. Pengecoran Jalan Ke TPS</div><div>6. Keermur Lapang Sepak Bola</div></div><div><div>7. Keermur Makam RW 03</div><div>8. Keermur Sungai Ciburaleng,</div><div>9. MCK</div><div>10. Pembentengan TPS</div><div>11. Kursi Roda</div><div>12. Tongkat Jalan</div></div></div>	

Dokumentasi Kegiatan



Tabel 22

Pelaksanaan dan Rekapitulasi Gagasan Kegiatan Musyawarah Dusun I RW 06

Judul Kegiatan	Musyawarah Dusun I RW 06	
Tanggal	Selasa, 28 November 2023 19.00 – 22.00 WIB	
Unsur Peserta	Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM, BPD, LPMD, Bhabibkamtibmas, Kadus, Ketua RW dan RT, PKK, Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna	
Output	Daftar Hadir Peserta Musyawarah, Notulen Rapat & Berita Acara, Pemetaan Potensi dan masalah, Pengkajian dan Pemeringkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan Serap aspirasi/gagasan masyarakat.	
Gagasan/Usulan Kegiatan	<div><div>1. MCK</div><div>2. Rabat Beton</div><div>3. Keermur</div><div>4. Tower Posyandu</div><div>5. Rutilahu</div><div>6. Septictank Umum</div><div>7. Drainase</div><div>8. Meteran Listrik Posyandu</div><div>9. Bantuan Disabilitas</div><div>10. Bantuan Anak Yatim</div><div>11. Bantuan Jompo</div><div>12. Bantuan Guru Ngaji</div><div>13. Alat Kesenian, Calung</div><div>14. Posyandu Remaja</div></div>	

Dokumentasi Kegiatan



Tabel 23

Pelaksanaan dan Rekapitulasi Gagasan Kegiatan Musyawarah Dusun II RW 04

Judul Kegiatan	Musyawarah Dusun II RW 04
Tanggal	Rabu, 29 November 2023 15.00 – 18.00 WIB
Unsur Peserta	Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM, BPD, LPMD, Bhabibkamtibmas, Kadus, Ketua RW dan RT, PKK, Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna
Output	Daftar Hadir Peserta Musyawarah, Notulen Rapat & Berita Acara, Pemetaan Potensi dan masalah, Pengkajian dan Pemingkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan Serap aspirasi/gagasan masyarakat.
Gagasan/Usulan Kegiatan	<div><div>1. Rutilahu</div><div>2. Sumber Air Bersih (SAB)</div><div>3. Rabat Beton Jalan Gang</div><div>4. Pipanisasi SAB</div><div>5. Tower Penampung Air</div><div>6. Mebelair Posyandu</div></div>

Dokumentasi Kegiatan



Tabel 24

Pelaksanaan dan Rekapitulasi Gagasan Kegiatan Musyawarah Dusun II RW 11

Judul Kegiatan	Musyawarah Dusun II RW 11	
Tanggal	Rabu, 29 November 2023 19.00 – 22.30 WIB	
Unsur Peserta	Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM, BPD, LPMD, Bhabibkamtibmas, Kadus, Ketua RW dan RT, PKK, Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna	
Output	Daftar Hadir Peserta Musyawarah, Notulen Rapat & Berita Acara, Pemetaan Potensi dan masalah, Pengkajian dan Pemingkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan Serap aspirasi/gagasan masyarakat.	
Gagasan/Usulan Kegiatan	<div><div><div>1. Sumber Air Bersih (SAB)</div><div>2. Rutilahu</div><div>3. Rabat Beton Jalan Gang</div><div>4. Pipanisasi Pembuangan</div><div>5. Mesin Pompa Air</div><div>6. Pembenahan Jembatan di Pabrik</div></div><div><div>7. MCK</div><div>8. Pembangunan Madrasah</div><div>9. Bantuan Guru Ngaji</div><div>10. Bantuan Anak Yatim</div><div>11. Bantuan Anak Disabilitas</div><div>12. Bantuan Pengurus DKM/Guru Ngaji</div><div>13. Bimbingan Pra Nikah</div></div></div>	

Dokumentasi Kegiatan





Tabel 25

Pelaksanaan dan Rekapitulasi Gagasan Kegiatan Musyawarah Dusun III RW 09

Judul Kegiatan	Musyawarah Dusun III RW 09	
Tanggal, Waktu	Kamis, 30 November 2023 19.30 – 23.00 WIB	
Unsur Peserta	Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM, BPD, LPMD, Bhabibkamtibmas, Kadus, Ketua RW dan RT, PKK, Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna	
Output	Daftar Hadir Peserta Musyawarah, Notulen Rapat & Berita Acara, Pemetaan Potensi dan masalah, Pengkajian dan Pemeringkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan Serap aspirasi/gagasan masyarakat.	
Gagasan/Usulan Kegiatan	<div><div>1. Rutilahu</div><div>2. Rabat Beton Jalan Gang</div><div>3. Gedung Posyandu</div><div>4. Plat Decker</div><div>5. Perbaikan Jalan Penghubung</div><div>6. Sumber Air Bersih</div><div>7. Santunan Anak Yatim</div><div>8. Sarana Olah Raga</div><div>9. Bantuan Jompo</div><div>10. Bantuan Guru Ngaji</div><div>11. Pelatihan UMKM</div></div>	

Dokumentasi Kegiatan



Tabel 26

Pelaksanaan dan Rekapitulasi Gagasan Kegiatan Musyawarah Dusun III RW 10

Judul Kegiatan	Musyawarah Dusun III RW 10	
Tanggal, Waktu	Jum'at, 01 Desember 2023 15.30 – 18.00 WIB	
Unsur Peserta	Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM, BPD, LPMD, Bhabibkamtibmas, Kadus, Ketua RW dan RT, PKK, Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna	
Output	Daftar Hadir Peserta Musyawarah, Notulen Rapat & Berita Acara, Pemetaan Potensi dan masalah, Pengkajian dan Pemingkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan Serap aspirasi/gagasan masyarakat.	
Gagasan/Usulan Kegiatan	<div> <div>1. Rutilahu</div> <div>2. Septictank Komunal</div> <div>3. POS Kamling</div> <div>4. Rabat Beton Jalan Gang,</div> <div>5. Gorong-gorong,</div> <div>6. Pintu Air</div> <div>7. Gedung Serba Guna</div> <div>8. Mesin Pompa Air</div> <div>9. Paket Lampu LED 100 Watt dan Kabel</div> <div>10. Lapang Tenis Meja</div> <div>11. Net dan Bola Volley</div> <div>12. Bantuan Jompo</div> <div>13. Bantuan Yatim</div> </div>	

Dokumentasi Kegiatan



Tabel 27

Pelaksanaan dan Rekapitulasi Gagasan Kegiatan Musyawarah Dusun IV RW 12

Judul Kegiatan	Musyawarah Dusun IV RW 12	
Tanggal, Waktu	Kamis, 07 Desember 2023 19.30 – 22.30 WIB	
Unsur Peserta	Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM, BPD, LPMD, Bhabibkamtibmas, Kadus, Ketua RW dan RT, PKK, Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna	
Output	Daftar Hadir Peserta Musyawarah, Notulen Rapat & Berita Acara, Pemetaan Potensi dan masalah, Pengkajian dan Pemeringkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan Serap aspirasi/gagasan masyarakat.	
Gagasan/Usulan Kegiatan	<div><div>1. Sumber Air Bersih</div><div>2. Rabat Beton Jalan</div><div>3. Drainase</div><div>4. Rutilahu</div><div>5. MCK</div><div>6. Pembangunan Pesantren</div><div>7. Bantuan Warga Miskin,</div><div>8. Bantuan Modal UMKM</div><div>9. Sarana dan Prasarana Keagamaan</div></div>	

Dokumentasi Kegiatan



Tabel 28

Pelaksanaan dan Rekapitulasi Gagasan Kegiatan Musyawarah Dusun IV RW 08

Judul Kegiatan	Musyawarah Dusun IV RW 08
Tanggal, Waktu	Jum'at, 08 Desember 2023 15.30 – 18.00 WIB
Unsur Peserta	Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM, BPD, LPMD, Bhabibkamtibmas, Kadus, Ketua RW dan RT, PKK, Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna
Output	Daftar Hadir Peserta Musyawarah, Notulen Rapat & Berita Acara, Pemetaan Potensi dan masalah, Pengkajian dan Pemeringkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan Serap aspirasi/gagasan masyarakat. <div><div><div>1. Saluran Irigasi</div><div>2. Rabat Beton</div><div>3. Pembangunan Posyandu</div><div>4. SumberAir Bersih</div><div>5. Rehabilitasi TPS</div><div>6. Pembangunan Jalan</div><div>7. Pembangunan Tempat Keranda</div><div>8. Penerangan Area TPU</div><div>9. MCK</div></div><div><div>10. Tong Sampah</div><div>11. Pembangunan POS Kamling</div><div>12. Rutilahu</div><div>13. Kursi Roda</div><div>14. Bantuan Warga Miskin</div><div>15. Bantuan Anak Yatim</div><div>16. Bantuan Jompo</div><div>17. Alat Kesenian: Rebana, Calung, Reog, Gendang</div><div>18. Pengadaan Bola Volley dan Sepak Bola</div></div></div>

Dokumentasi Kegiatan



Tabel 29

Pelaksanaan dan Rekapitulasi Gagasan Kegiatan Musyawarah Dusun IV RW 13

Judul Kegiatan	Musyawarah Dusun IV RW 13	
Tanggal, Waktu	Jum'at, 09 Desember 2023 19.30 – 22.30 WIB	
Unsur Peserta	Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM, BPD, LPMD, Bhabibkamtibmas, Kadus, Ketua RW dan RT, PKK, Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna	
Output	Daftar Hadir Peserta Musyawarah, Notulen Rapat & Berita Acara, Pemetaan Potensi dan masalah, Pengkajian dan Pemingkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan Serap aspirasi/gagasan masyarakat.	
Gagasan/Usulan Kegiatan	<div><div><div>1. Pompa Air Artesis</div><div>2. Pembangunan Tower Air</div><div>3. Pemeliharaan Jalan Lingkungan</div><div>4. Rabat Beton Jalan</div><div>5. Rutilahu</div><div>6. Benteng Jalan Gang</div><div>7. Rehab Posyandu</div></div><div><div>8. Pembangunan Gapura</div><div>9. Pembangunan Lapang Volley</div><div>10. Keermur</div><div>11. Bantuan Modal UMKM</div><div>12. Bantuan Lansia</div><div>13. Fasilitasi Pelimpahan Perumahan Bumi Nusa Indah</div></div></div>	

Dokumentasi Kegiatan





Tabel 30

Pelaksanaan dan Rekapitulasi Gagasan Kegiatan Musyawarah Dusun III RW 05

Judul Kegiatan	Musyawarah Dusun III RW 05	
Tanggal, Waktu	Sabtu, 02 Desember 2023 15.30 – 18.00 WIB	
Unsur Peserta	Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM, BPD, LPMD, Bhabibkamtibmas, Kadus, Ketua RW dan RT, PKK, Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna	
Output	Daftar Hadir Peserta Musyawarah, Notulen Rapat & Berita Acara, Pemetaan Potensi dan masalah, Pengkajian dan Pemingkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan Serap aspirasi/gagasan masyarakat.	
Gagasan/Usulan Kegiatan	<div>1. Jalan Lingkungan Utama</div> <div>2. Pipanisasi Pembuangan Air Limbah/Hujan</div> <div>3. Pintu Air</div> <div>4. Jembatan Penghubung</div> <div>5. Sumber Air Bersih</div> <div>6. Jalan Gang</div> <div>7. Bantuan Modal UMKM</div> <div>8. Bantuan Disabilitas</div> <div>9. Bantuan Yatim</div> <div>10. Bantuan ODGJ</div> <div>11. Bantuan Jompo</div>	

Dokumentasi Kegiatan



Tabel 31

Pelaksanaan dan Rekapitulasi Gagasan Kegiatan Musyawarah Dusun III RW 14

Judul Kegiatan	Musyawarah Dusun III RW 14	
Tanggal, Waktu	Sabtu, 02 Desember 2023 19.30 – 22.00 WIB	
Unsur Peserta	Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM, BPD, LPMD, Bhabibkamtibmas, Kadus, Ketua RW dan RT, PKK, Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna	
Output	Daftar Hadir Peserta Musyawarah, Notulen Rapat & Berita Acara, Pemetaan Potensi dan masalah, Pengkajian dan Pemingkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan Serap aspirasi/gagasan masyarakat.	
Gagasan/Usulan Kegiatan	<div> <div> 1. Mesin Pompa Penyedot Air dan Selang 2. Perbaiki Drainase, 3. Pintu Air Sungai 4. Sarana Lapang Olah Raga Volley 5. Pengecoran Jalan Utama Blok C, 6. Pipanisasi Pembuangan Limbah Warga 7. Pembangunan Kantor Sekretariat RW </div> <div> 8. Bola Volley 9. Net Volley 10. Sarana dan Prasarana Posyandu 11. Alat Bantu Dengar 12. Tongkat Ketiak 13. Kursi Roda 14. Perlengkapan Seni Budaya Sunda </div> </div>	

Dokumentasi Kegiatan



Tabel 32

Pelaksanaan dan Rekapitulasi Gagasan Kegiatan Musyawarah Dusun IV RW 07

Judul Kegiatan	Musyawarah Dusun IV RW 07	
Tanggal, Waktu	Minggu, 03 Desember 2023 19.30 – 22.30 WIB	
Unsur Peserta	Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM, BPD, LPMD, Bhabibkamtibmas, Kadus, Ketua RW dan RT, PKK, Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna	
Output	Daftar Hadir Peserta Musyawarah, Notulen Rapat & Berita Acara, Pemetaan Potensi dan masalah, Pengkajian dan Pemingkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan Serap aspirasi/gagasan masyarakat.	
Gagasan/Usulan Kegiatan	<div><div><div>1. Rabat Beton Jalan Gang,</div><div>2. Keermur,</div><div>3. Rutilahu</div><div>4. SAB</div><div>5. Pembangunan Jembatan Penghubung</div><div>6. Lapang Tennis Meja</div><div>7. Perbaikan Drainase,</div><div>8. ATK dan Mebelair Al-Kautsar</div><div>9. Speaker Aktif Masjid</div></div><div><div>10. Bantuan Modal UMKM</div><div>11. Bantuan Yatim Orang</div><div>12. Bantuan Jompo Orang</div><div>13. Alat Musik Hadroh</div><div>14. Alat Pencak Silat</div><div>15. Bantuan Benih/Biibit/Modal Budi Daya Ikan</div></div></div>	

Dokumentasi Kegiatan





4.5. ANALISIS HASIL REKOMENDASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

Sumber Data: Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan | KDPDTT | dashboard web IDM

1. OLAH DATA PER ITEM

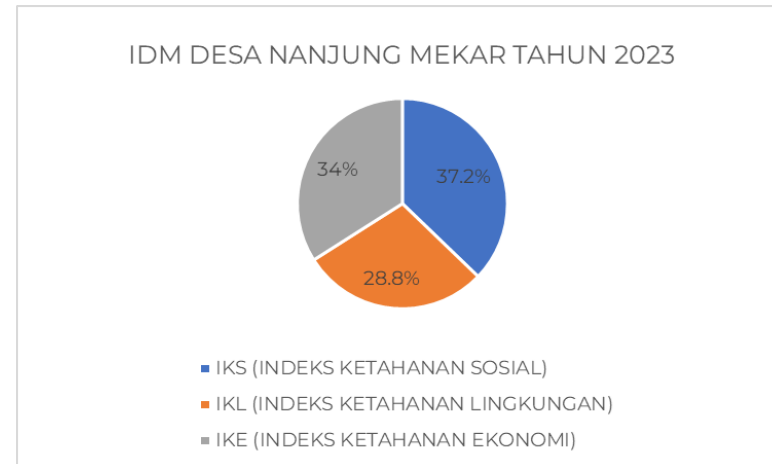
STATUS IDM : MANDIRI

IKS (INDEKS KETAHANAN SOSIAL) : 37.2%

IKL (INDEKS KETAHANAN LINGKUNGAN) : 28.8%

IKE (INDEKS KETAHANAN EKONOMI) : 34%

NILAI IDM : 0.8495



INDEKS KOMPOSIT : SOSIAL (INDEKS KETAHANAN SOSIAL)

DIMENSI	PERANGKAT INDIKATOR	INDIKATOR PER ITEM	EXISTING DARI INDIKATOR UMUM	REKOMENDASI	
				Super Prioritas (0,00% - 0,50%)	Prioritas (0,50% - 0,75%)
Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Jarak ke sarana kesehatan terdekat	1.00		
		Ketersediaan Tenaga Kesehatan (bidan,Dokter dan Nakes Lain)	1.00		
	Keberdayaan Masyarakat	Askes ke poskesdes, polindes atau posyandu	0.20	√	



	Untuk Kesehatan	Tingkat Aktivitas Posyandu	1.00		
	Jaminan Kesehatan	Tingkat Kepesertaan BPJS	.,60		√
Pendidikan	Akses Pendidikan Dasar-Menengah	Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM	1.00		
		Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM	1.00		
		Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM	1.00		
	Akses Pendidikan Non Formal	Kegiatan PAUD	1.00		
		Kegiatan PKBM/Paket A-B-C	1.00		
		Kegiatan Kursus	1.00		
	Akses Pengetahuan Masyarakat	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa	1.00		
MODAL SOSIAL	Solidaritas Sosial	Kebiasaan Gotong Royong	1.00		
		Keterbukaan Ruang Publik	1.00		
		Terdapat Kelompok Olahraga	1.00		
		Terdapat Kegiatan Olahraga	1.00		
	Toleransi	Keragaman Suku/Etnis di Desa	1.00		
		Bahasa Sehari-hari Warga Desa	1.00		
		Agama Mayoritas Warga Desa	1.00		
	Rasa Aman Warga Desa	Tersedianya Sarana Pos Kamling di Desa	1.00		
		Partisipasi Warga Siskamling	1.00		
		Kejadian Perkelahian Massal di desa	1.00		
	Kesejahteraan Sosial	Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa	0.60		√
		Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anjal dan Pengemis)	1.00		

PERMUKIMAN	Akses Air Bersih dan Layak Minum	Mayoritas Warga Memiliki Sumber Air layak Minum	1.00		
		Akses Warga Memiliki Air Mandi dan Mencuci	0.80		√
	Akses ke Fasilitas Sanitasi	Mayoritas Warga Memiliki Jamban	1.00		
		Terdapat Tempat Pembuangan Sampah	1.00		
	Akses Ke Fasilitas Listrik	Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik	1.00		
	Akses Fasilitas Informasi dan Komunikasi	Warga Memiliki Telepon seluler dan Sinyal Kuat	1.00		
		Akses Internet di Kantor Desa	1.00		
		Terdapat Akses Internet untuk warga	1.00		

INDEKS KOMPOSIT : EKONOMI (INDEKS KETAHANAN EKONOMI)

DIMENSI	PERANGKAT INDIKATOR	INDIKATOR PER ITEM	EXISTING DARI INDIKATOR UMUM	REKOMENDASI	
				Super Prioritas (0,00% - 0,50%)	Prioritas (0,50% - 0,75%)
Keragaman Produksi	Keragaman Produksi Masyarakat Desa	Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Penduduk	1.00		
Perdagangan	Tersedianya Pusat Perdagangan	Akses Penduduk ke Pusat Perdagangan(Pertokoan, Pasar Permanen)	1.00		
		Terdapat Pasar Desa	0.20	√	
		Terdapat Sektor Perdagangan (warung minimarket)	1.00		
Akses Distribusi	Akses Distribusi Logistik	Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik	1.00		



Akses Kredit	Akses Terhadap lembaga Keuangan dan Perkreditan	Tersedianya Lembaga Perbankan Umum dan BPR	1.00		
		Akses Penduduk ke Kredit	0.60		√
Lembaga Ekonomi	Lembaga Ekonomi	Tersedianya Lembaga Ekonomi Rakyat (Koperasi)/Bumdes	1.00		
		Terdapat Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan	0.60		√
Keterbukaan Wilayah	Keterbukaan Wilayah	Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi)	1.00		
		Jalan yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	1.00		
		Kualitas Jalan Desa	1.00		

INDEKS KOMPOSIT : LINGKUNGAN (INDEKS KETAHANAN LINGKUNGAN)

DIMENSI	PERANGKAT INDIKATOR	INDIKATOR PER ITEM	EXISTING DARI INDIKATOR UMUM	REKOMENDASI	
				Super Prioritas (0,00% - 0,50%)	Prioritas (0,50% - 0,75%)
Kualitas Lingkungan	Kualitas Lingkungan	Pencemaran Air, Tanah dan Udara	0.40	√	
Potensi Dan Tanggap Bencana	Potensi Rawan Bencana	Kejadian Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan)	0.80		
	Tanggap Bencana	Upaya/Tindakan terhadap Potensi Bencana Alam	1.00		



2. RUMUSAN POKOK ANALISIS HASIL REKOMENDASI IDM

PROVINSI	: JAWA BARAT	SKOR IDM SAAT INI	: 0.8495
KABUPATEN	: BANDUNG	STATUS IDM	: MANDIRI
KECAMATAN	: RANCAEKEK	TARGET STATUS	: MANDIRI
DESA	: NANJUNG MEKAR	SKOR IDM MINIMAL	: 0.8156
		PENAMBAHAN YANG DIBUTUHKAN	: -0.0339

NO	INDIKATOR IDM	SKOR	KETERANGAN	KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN	+NILAI	YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN					
						PUSAT	PROV.	KAB.	DESA	CSR	LAIN NYA
1	Skor Akses Sarkes	5	Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit	-	0.0000			Dinkes, PU			
2	Skor Dokter	5	Jumlah dokter ≥ 1 orang	-	0.0000			DINKES			
3	Skor Bidan	5	Jumlah bidan ≥ 1 orang	-	0.0000			DINKES			
4	Skor Nakes Lain	5	Jumlah tenaga kesehatan lainnya ≥ 5 orang	-	0.0000			DINKES			
5	Skor Tingkat Kepesertaan BPJS	3	Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,26 s.d 0,5	Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75%	0.0038			DINKES			BPJS



6	Skor Akses Poskesdes	1	Jarak tempuh menuju Poskesdes > 3500 Meter	Pembangunan Poskesdes	0.0076		DINKES	
7	Skor Aktivitas Posyandu	5	Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75	-	0.0000	DPMD	DPMD, DINKES	DD
8	Skor Akses SD/MI	5	Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter	-	0.0000		DISDIK, PU	
9	Skor Akses SMP/MTS	5	Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter	-	0.0000		DISDIK, PU	
10	Skor Akses SMA/SMK	5	Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter	-	0.0000	DISDIK	PU	
11	Skor Ketersediaan PAUD	5	Jumlah PAUD ≥ 1	-	0.0000	DISDIK	DISDIK	DD
12	Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC	5	Jumlah PKBM atau Paket ABC ≥ 1	-	0.0000		DISDIK	
13	Skor Ketersediaan Kursus	5	Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus ≥ 1	-	0.0000		CSR	Swasta, Perorangan



14	Skor Ketersediaan Taman Baca/Perpus Desa	5	Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia	-	0.0000	Kemenperpus Arsip	Dinas Perpus	Dinas Perpus	DD	CSR	
15	Skor Kebiasaan Goryong	5	Terdapat Kebiasaan Gotong Royong	-	0.0000				Desa		
16	Skor Frekuensi Goryong	5	Frekuensi Gotong Royong > 2	-	0.0000				Desa		
17	Skor Ketersediaan Ruang Publik	5	Ruang Publik terdapat didesa	-	0.0000			PU	DD		
18	Skor Kelompok OR	5	Jumlah kelompok kegiatan olahraga > 7	-	0.0000		DISPORA	DISPORA	Karang Taruna		
19	Skor Kegiatan OR	5	Jumlah kegiatan olahraga > 7	-	0.0000	Kemepora/Kemendes	DISPORA	DISPORA	DD	CSR	Perorangan
20	Skor Keragaman Agama	5	Jumlah Jenis Agama di Desa > 1	-	0.0000				Desa		
21	Skor Keragaman Bahasa	5	Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1	-	0.0000				Desa		
22	Skor Keragaman Komunikasi	5	Warga Desa terdiri dari Suku > 1	-	0.0000				Desa		
23	Skor	5	Terdapat Pos	-	0.0000				DD		



	Poskamling		Keamanan di Desa									
24	Skor Siskamling	5	Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa	-	0.0000						Desa	
25	Skor Konflik	5	Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa	-	0.0000						Kesbangpol	
26	Skor PMKS	5	Jumlah PMKS tidak ada atau 0	-	0.0000						Dinsos	
27	Skor SLB	3	Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5	Penanganan SLB	0.0038	DIKNAS						
28	Skor Akses Listrik	5	(Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9)	-	0.0000	ESDM	ESDM			DD	CSR	Perorangan
29	Skor Sinyal Tlp	5	Sinyal telepon seluler di Desa Kuat	-	0.0000	Kominfo	Diskominfo	Diskominfo				Operator Selular
30	Skor Internet Kantor Desa	5	Terdapat fasilitas internet di kantor Desa	-	0.0000	Kominfo / Kemendes			Desa		CSR	
31	Skor Akses Internet Warga	5	Terdapat Akses internet warga di Desa	-	0.0000	Kominfo	Diskominfo	Diskominfo				Operator Selul



										ar
32	Skor Akses Jamban	5	Warga Desa BAB di Jamban Sendiri	-	0.0000			DINSOS,DI NKES	CSR	Perorangan
33	Skor Sampah	5	Warga desa membuang sampah di Tempat Sampah kemudian diangkut	-	0.0000	DLH	DLH, DKPP	DD	CSR	
34	Skor Air Minum	5	Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran	-	0.0000	PAMSIM AS, PU	PU	DD	CSR	PDA M
35	Skor Air Mandi & Cuci	4	Sumber air mandi dan cuci berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur	Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran	0.0019	PAMSIM AS, PU	PU	DD	CSR	PDA M
IKS 2023		0.9486								
1	Skor Keragaman Produksi	5	Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK $\geq 0,004$	-	0.0000	DISPERINDAKOP UKM	DISPERINDAKOP UKM	DD	CSR	Perorangan
2	Skor Pertokoan	5	Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM	-	0.0000		DISPERINDAKOP UKM			Perorangan, Swasta



3	Skor Pasar	1	(Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0	Pembangunan Pasar Permanen	0.0222	Kemenp erind, Kemendes	DISPERINDAK OP UKM	DISPERINDAK OP UKM		
4	Skor Toko/ Warung Kelontong	5	Jumlah Toko dan warung kelontong > 3	-	0.0000				DD	Perorangan
5	Skor Kedai & Penginapan	3	Jumlah Kedai dan Penginapan = 1	Pembangunan 1 Unit Penginapan	0.0111		Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	DD	Perorangan, Swasta
6	Skor POS & Logistik	5	Jumlah pos dan jasa logistik > 1	-	0.0000				BUMDES	Kantor Pos, Swasta
7	Skor Bank & BPR	5	Jumlah bank dan BPR > 1	-	0.0000					Perbankan
8	Skor Kredit	3	Jumlah fasilitas kredit = 2	Penambahan 2 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit)	0.0111		DISPERINDAK OP UKM	DISPERINDAK OP UKM	BUMDES/ Koperasi	Bank, Swasta
9	Skor Lembaga	5	Jumlah koperasi aktif dan	-	0.0000		DISPERINDAK OP UKM	DISPERINDAK OP UKM	Desa	CSR



Ekonomi			BUMDESA > 1						
10	Skor Moda Transportasi Umum	5	Transportasi Umum ada dengan trayek tetap	-	0.0000		DISHUB		
11	Skor Keterbukaan Wilayah	5	Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun	-	0.0000		PU	DD	CSR
12	Skor Kualitas Jalan	5	Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton	-	0.0000		PU	DD	CSR
IKE 2023		0.8667							
1	Skor Kualitas Lingkungan	2	Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0,75	Identifikasi dan Penanganan 3 Jenis Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa	0.0667	DLH	DLH, DINKES		
2	Skor Rawan Bencana	4	Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 1	Identifikasi 1 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk	0.0222	DISHUT /KPH, BPDB	BPBD		



				penanganan pencegahan						
3	Skor Tanggap Bencana	5	Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 3	-	0.0000	BNPB, Kemend es	DISHUT /KPH, BPDB, DINSOS	DPBD, DINSOS	DD	CSR
IKL 2023		0.7333								
IDM 2023		0.8495								
STATUS IDM 2023		Mandiri								

3. ANALISIS REKOMENDASI HASIL IDM

INDEKS KETAHANAN SOSIAL

DIMENSI	PERANGKAT INDIKATOR	INDIKATOR PER ITEM	EKSISTING	REKO-MENDASI
Kesehatan	Keberdayaan Masyarakat Untuk Kesehatan	Askes ke poskesdes, polindes atau posyandu	0.20	Super Prioritas
		Jaminan Kesehatan	0.60	Prioritas
Modal Sosial	Kesejahteraan Sosial	Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa	0.60	Prioritas

INDEKS KETAHANAN EKONOMI

DIMENSI	PERANGKAT INDIKATOR	INDIKATOR PER ITEM	EKSISTING	REKO-MENDASI
Perdagangan	Tersedianya Pusat Perdagangan	Terdapat Pasar Desa	0.20	Super Prioritas
Akses Kredit	Akses Terhadap lembaga Keuangan dan Perkreditan	Akses Penduduk ke Kredit	0.60	Prioritas
Lembaga Ekonomi	Lembaga Ekonomi	Terdapat Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan	0.60	Prioritas

INDEKS KETAHANAN LINGKUNGAN

DIMENSI	PERANGKAT INDIKATOR	INDIKATOR PER ITEM	EKSISTING	REKO-MENDASI
Kualitas Lingkungan	Kualitas Lingkungan	Pencemaran Air, Tanah dan Udara	0.40	Super Prioritas



4.6. ANALISIS CAPAIAN SDGs DESA

(Dashboard SDGs Desa Kementerian Desa, PDTT)

CAPAIAN SDGS DESA

Provinsi : JAWA BARAT
Kabupaten : KAB. BANDUNG
Kecamatan : RANCAEKEK
Desa : NANJUNG MEKAR

<div><div>Capaian Keseluruhan 51.07</div></div>					
<div><div>1 DESA TANPA KEMISKINAN</div></div>	Capaian 73.73	<div><div>2 DESA TANPA KELAPARAN</div></div>	Capaian 50	<div><div>3 DESA SEHAT DAN SEJAHTERA</div></div>	Capaian 63.33
<div><div>4 PENDIDIKAN DESA BERKUALITAS</div></div>	Capaian 39.8	<div><div>5 KETERLIBATAN PEREMPUAN DESA</div></div>	Capaian 39.37	<div><div>6 DESA LAYAK AIR BERSIH DAN SANITASI</div></div>	Capaian 46.73
<div><div>7 DESA BERENERGI BERSIH DAN TERBARUKAN</div></div>	Capaian 99.15	<div><div>8 PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA</div></div>	Capaian 35.76	<div><div>9 INFRASTRUKTUR DAN INOVASI DESA SESUAI KEBUTUHAN</div></div>	Capaian N/A
<div><div>10 DESA TANPA KESENJANGAN</div></div>	Capaian 39.6	<div><div>11 KAWASAN PERMUKIMAN DESA AMAN DAN NYAMAN</div></div>	Capaian 58.17	<div><div>12 KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA SADAR LINGKUNGAN</div></div>	Capaian 0
<div><div>13 DESA TANGGAP PERUBAHAN IKLIM</div></div>	Capaian N/A	<div><div>14 DESA PEDULI LINGKUNGAN LAUT</div></div>	Capaian 50	<div><div>15 DESA PEDULI LINGKUNGAN DARAT</div></div>	Capaian 30.34
<div><div>16 DESA DAMAI BERKEADILAN</div></div>	Capaian 86.74	<div><div>17 KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN DESA</div></div>	Capaian 73.42	<div><div>18 KELEMBAGAAN DESA DINAMIS DAN BUDAYA DESA ADAPTIF</div></div>	Capaian 30.96

1

DESA TANPA KEMISKINAN



Capaian

73.73

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	78.04	2258	Jiwa
1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	92.09	194	Jiwa
1.2.1	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	49.15	145	Jiwa
1.2.2	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	3.85	2	Jiwa
1.3	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	58.33	56	Keluarga
1.4.1	Individu miskin mendapat layanan kesehatan	71.05	27	Jiwa
1.4.2	Individu miskin mendapat pendidikan SD	100	33	Jiwa
1.4.3	Individu miskin mendapat pendidikan SMP	87.5	14	Jiwa
1.4.4	Individu miskin mendapat pendidikan SMA	92.86	26	Jiwa
1.4.5	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3/S1/S2)	4.4	8	Jiwa
1.4.6	Keluarga miskin pengguna listrik (PLN/NonPLN)	100	96	Keluarga
1.4.7	Keluarga miskin dengan akses sanitasi layak	77.08	74	Keluarga
1.4.8	Keluarga miskin dengan kondisi rumah tidak kumuh subjektif	91.67	88	Keluarga
1.4.9	Keluarga miskin dengan kondisi rumah tidak kumuh objektif	100	97	Keluarga
1.5	Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%	100	4	Jiwa

2

DESA TANPA KELAPARAN



Capaian

50

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
2.1	Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%	100	0	Jiwa
2.2	Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%	0	0	Jiwa

3

DESA SEHAT
DAN SEJAHTERA



Capaian

63.33

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
3.1	BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk	55.5	5706	Jiwa
3.2	Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%	24.88	1461	Jiwa
3.3	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%	0	0	Jiwa
3.4	Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0	100	0	Jiwa
3.5	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0	100	0	Jiwa
3.7	Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%	99.6	41	Jiwa

4

PENDIDIKAN
DESA BERKUALITAS




Capaian

39.8

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
4.1.1	Akses anak ke SD/MI berakreditasi minimal B mencapai 100%	60.85	1783	Keluarga
4.1.2	Akses anak ke SMP/MTs berakreditasi minimal B mencapai 100%	53.24	1560	Keluarga
4.1.3	Akses anak ke SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100%	50.14	1469	Keluarga
4.2	Akses anak ke pesantren mencapai 100%	19.39	568	Keluarga
4.3.1	APK SD/MI mencapai 100%	23.72	278	Jiwa
4.3.2	APK SMP/MTs mencapai 100%	22.11	128	Jiwa
4.3.3	APK SMA/MA mencapai 100%	24.5	159	Jiwa
4.4.1	APM SD/MI laki-laki dan perempuan mencapai 100%	21.93	257	Jiwa
4.4.2	APM SMP/MTs laki-laki dan perempuan mencapai 100%	17.96	104	Jiwa
4.4.3	APM SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100%	19.11	124	Jiwa
4.6.1	Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun	82.33	9.88	Tahun
4.6.2	Rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 12 tahun	82.33	9.88	Tahun

5 KETERLIBATAN PEREMPUAN DESA



Capaian

39.37

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
5.1	Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%	0	0	Peraturan
5.2	Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.	0	0	Peraturan
5.5	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun	89.47	17	Tahun
5.7	APK SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai 100%	24.5	159	Jiwa
5.8	Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%	22.22	1	Jiwa
5.9	Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30%	100	2	Jiwa

6 DESA LAYAK AIR BERSIH DAN SANITASI



Capaian

46.73

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
6.1.1	Akses terhadap layanan air minum layak mencapai 100% keluarga	94.91	2781	Keluarga
6.1.2	Akses terhadap sanitasi layak mencapai 100% keluarga	88.81	2602	Keluarga
6.2	Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100%	93.17	2730	Keluarga
6.3	Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100%	3.48	102	Keluarga
6.5	Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air	0	0	Peraturan
6.7	Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai	0	0	Peraturan

7

DESA BERENERGI BERSIH DAN TERBARUKAN



Capaian

99.15

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
7.1	Keluarga pengguna listrik mencapai 100% dengan konsumsi >1.200 kWh/kapita	97.71	2863	Keluarga
7.2	Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%	99.73	2922	Keluarga
7.4	Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak <50%	100	4	Keluarga

8

PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA




Capaian

35.76

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
8.1	PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta	63.54	19696333.34	Rupiah
8.2	Pekerja sektor formal minimal 51%	14.35	273	Jiwa
8.4	Tingkat pengangguran terbuka 0%	64.86	2020	Jiwa
8.6	Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%	0.3	6	Jiwa

10

DESA TANPA KESENJANGAN



Capaian

39.6

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
10.1	Koefisien Gini desa di bawah 0,200	20.1	1	-
10.3	Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100%	100	3	Jiwa
10.4	Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%	38.32	1430	Jiwa
10.5	Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran	0	0	Peraturan

11

KAWASAN PERMUKIMAN DESA AMAN DAN NYAMAN



Capaian

58.17

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
11.1	Rumah kumuh mencapai 0%	95.09	144	Keluarga
11.3	Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50%	80.79	1186	Keluarga
11.5	Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa	0	0	Kerjasama
11.9	Terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%	56.79	1664	Keluarga

12

KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA SADAR LINGKUNGAN



Capaian

0

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
12.1	Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga	0	0	Desa

14

DESA PEDULI LINGKUNGAN LAUT




Capaian

50

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
14.1	Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumber daya laut	0	0	Peraturan
14.3	Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa	N/A	0	m2
14.5	Tidak ada ilegal fishing	100	1	Kejadian

15

DESA PEDULI LINGKUNGAN DARAT



Capaian

30.34

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
15.1	Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati	0	0	Peraturan
15.2	Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa	60.67	28529	ha
15.5	Peningkatan satwa yang terancam punah >50%	N/A	0	Ekor

16

DESA DAMAI BERKEADILAN



Capaian

86.74

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
16.2	Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan	5.16	393	Jiwa
16.3	Pekerja anak mencapai 0%	99.9	3	Jiwa
16.7	Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes	100	1	Laporan
16.8	SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku	88.89	8	Jiwa
16.9	Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi	100	293	Jiwa
16.10	Perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30%	100	6	Jiwa
16.11	Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100%	100	3	Jiwa
16.14	Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani	100	1	Sistem informasi dan keuangan yang diperbaharui

17

KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN DESA



Capaian

73.42

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
17.1	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun	67.12	198519900	Rupiah
17.2	Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional	0	0	Kerjasama
17.3	Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi	100	1	Jaringan internet
17.6	Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa	100	100	Data dan petugas statistik
17.7	Tersedia data SDGs setiap tahun	100	1	Data SDGs

18

KELEMBAGAAN DESA DINAMIS DAN BUDAYA DESA ADAPTIF



Capaian

30.96

No	Indikator	Capaian	Data Existing	Satuan
18.1	Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama	4.8	366	Jiwa
18.2	Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa	0	0	Musdes
18.5	Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun	50	2	Musdes
18.6	Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes	100	3	Dokumen
18.7	Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota	0	0	Peta desa



4.7. ANALISIS PETA JALAN SDGs DESA

No	Indikator	Nama Program	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting
1	1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	1	2258
2	1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	1	1845
3	1.2.1	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	1	1069
4	1.2.2	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	1	72
5	1.3	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	1	89
6	1.4.1	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	1	409
7	1.4.2	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	1	31
8	1.4.3	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	1	10
9	1.4.4	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	1	19
10	1.4.5	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	1	8
11	1.4.7	Keluarga miskin dengan sanitasi layak mencapai 100%	1	113
12	1.4.8	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	1	133
13	1.4.9	Keluarga miskin dengan hunian layak (objektif) mencapai 100%	1	143
14	2.2	Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif mencapai 100%	2	2
15	3.1	BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk	3	5707
16	3.2	Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%	3	484
17	3.3	Persentase Ibu hamil yang melahirkan di faskes mencapai 100%	3	0
18	3.7	Prevalensi TBC mencapai 0%	3	41
19	4.2	Persentase keluarga dengan akses ke Pesantren terdekat mencapai 100%	4	15
20	4.3.1	APK SD mencapai 100%	4	278
21	4.3.2	APK SMP mencapai 100%	4	128
22	4.3.3	APK SMA mencapai 100%	4	159
23	4.4.1	APM SD mencapai 100%	4	257
24	4.4.2	APM SMP mencapai 100%	4	104
25	4.4.3	APM SMA mencapai 100%	4	124
26	4.6.1	Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun	4	9.9
27	5.1	Persentase Keberadaan perdes/SK terkait gender	5	0
28	5.2	Persentase Keberadaan perdes/SK terkait jaminan untuk perempuan	5	0
29	5.5	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun	5	17



30	5.7	APK SMA mencapai 100%	5	125
31	5.8	Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%	5	1
32	6.1.1	Persentase keluarga dengan akses terhadap air minum layak mencapai 100%	6	2786
33	6.1.2	Persentase keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak mencapai 100%	6	2606
34	6.2	Keluarga yang dilayani air baku mencapai 100%	6	2735
35	6.3	Keluarga pengguna fasilitas air limbah mencapai 100%	6	102
36	6.5	Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air	6	0
37	6.7	Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai	6	0
38	7.1	Keluarga pengguna listrik mencapai 100%	7	2868
39	7.2	Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%.	7	2927
40	8.1	PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta	8	19686759
41	8.2	Pekerja sektor formal minimal 51%	8	273
42	8.4	Tingkat pengangguran terbuka 0%	8	2020
43	8.6	Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%	8	6
44	10.1	Koefisien Gini desa di bawah 0,200	10	1
45	10.4	Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%	10	1431
46	10.5	Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran	10	0
47	11.1	Rumah kumuh mencapai 0%	11	144
48	11.3	Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50%	11	1190
49	11.5	Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa	11	0
50	11.9	Terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%	11	1668
51	12.1	Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga	12	0
52	14.1	Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumber daya laut.	14	0
53	14.5	Tidak ada ilegal fishing.	14	1
54	15.1	Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati	15	0
55	15.2	Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa	15	28529
56	16.2	Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan	16	394
57	16.3	Pekerja anak mencapai 0%	16	3
58	16.7	Laporan pertanggungjawaban Kades	16	2



		dan laporan keuangan diterima dalam Musdes		
59	16.8	SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku	16	8
60	16.9	Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi	16	294
61	16.14.1	Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani	16	0
62	16.14.2	Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani	16	1
63	17.1	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun	17	198519900
64	17.2	Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional	17	0
65	17.3.1	Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi	17	1
66	17.3.2	Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi	17	1
67	17.6.1	Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa	17	1
68	17.6.2	Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa	17	2
69	17.7	Tersedia data SDGs setiap tahun	17	1
70	18.1	Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama	18	366
71	18.2	Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa	18	0
72	18.5	Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun	18	2
73	18.6.1	Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes	18	1
74	18.6.2	Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes	18	1
75	18.6.3	Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes	18	1
76	18.7.1	Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota	18	0
77	18.7.2	Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota	18	0

4.8. PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DESA

Tabel 33
Penyelenggaraan Musrenbang Desa

Judul Kegiatan	Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RPJM Desa
Tanggal, Waktu	Rabu, 03 Januari 2024 08.00 – 13.00 WIB
Unsur Peserta	Kecamatan Rancaekek, Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM, BPD, LPMD, Bhabibkamtibmas, Kadus, Ketua RW dan RT, PKK, Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna
Output	Daftar Hadir Peserta Musyawarah, Notulen Rapat & Berita Acara,
Dokumentasi Kegiatan	

4.9. PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA

Tabel 34

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Judul Kegiatan	Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RPJM Desa
Tanggal, Waktu Januari 2024 08.00 – 13.00 WIB
Unsur Peserta	Kecamatan Rancaekek, Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM, BPD, LPMD, Bhabibkamtibmas, Kadus, Ketua RW dan RT, PKK, Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna
Output	Daftar Hadir Peserta Musyawarah, Notulen Rapat & Berita Acara,
Dokumentasi Kegiatan	

4.10. PENYELENGGARAAN SOSIALISASI RPJM DESA

Tabel 35
Penyelenggaraan Sosialisasi RPJM Desa

Judul Kegiatan	Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RPJM Desa
Tanggal, Waktu	13 – 17 Januari 2024
Unsur Peserta	Kecamatan Rancaekek, Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM, BPD, LPMD, Bhabibkamtibmas, Kadus, Ketua RW dan RT, PKK, Tokoh Agama, Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna
Output	Daftar Hadir Peserta Musyawarah, Notulen Rapat & Berita Acara,
Dokumentasi Kegiatan	



BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA NANJUNG MEKAR
TAHUN 2024 - 2029

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

SUB BIDANG	KEGIATAN	SDGs
1.1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)5. Penyediaan Tunjangan BPD6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
1.2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa Lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa	Tujuan 9 Industri, inovasi, dan infrastruktur Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
1.3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh



	<ol style="list-style-type: none">4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif <p>lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan</p>	
1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)8. Pengembangan Sistem Informasi Desa9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa <p>lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan</p>	<p>Tujuan 9</p> <p>Industri, Inovasi dan Infrastruktur</p> <p>Tujuan 16</p> <p>Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</p> <p>Tujuan 17</p> <p>Kemitraan untuk Mencapai Tujuan</p>
1.5. Sub Bidang Pertanahan	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikasi Tanah Kas Desa2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin4. Mediasi Konflik Pertanahan	<p>Tujuan 11</p> <p>Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan</p> <p>Tujuan 16</p> <p>Perdamaian, Keadilan dan</p>

	5. Penyuluhan Pertanahan 6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 7. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*	Kelembagaan yang Tangguh
--	---	--------------------------

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

SUB BIDANG	KEGIATAN	SDGs
2.1 Sub Bidang Pendidikan	1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) 3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa 8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) 9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan	Tujuan 1 Desa Tanpa Kemiskinan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tujuan 4 Pendidikan berkualitas Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan
2.1 Sub Bidang Kesehatan	1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Tujuan 1 Desa Tanpa Kemiskinan

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa 6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD <p>lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan</p>	<p>Tujuan 3</p> <p>Kehidupan sehat dan sejahtera</p>
<p>2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Jalan Desa 2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 4. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa 5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) 6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 7. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa 8. Pemeliharaan Embung Milik Desa 9. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik 	<p>Tujuan 3</p> <p>Kehidupan Sehat dan Sejahtera</p> <p>Tujuan 6</p> <p>Air bersih dan sanitasi layak</p> <p>Tujuan 9</p> <p>Industri, inovasi, dan infrastruktur</p> <p>Tujuan 11</p> <p>Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan</p> <p>Tujuan 15</p> <p>Ekosistem Daratan</p>

	<p>Desa/Petilasan</p> <p>17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa</p> <p>18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa</p> <p>19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa</p> <p>20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa</p> <p>lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</p>	
2.4. Sub Bidang Kawasan Permukiman	<p>1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)</p> <p>2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa</p> <p>3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)</p> <p>4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)</p> <p>5. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)</p> <p>6. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll</p> <p>7. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)</p> <p>8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)</p> <p>9. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa</p> <p>10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan</p> <p>11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)</p> <p>12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)</p> <p>13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)</p> <p>14. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll</p> <p>15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)</p> <p>16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)</p> <p>17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa</p>	<p>Tujuan 6</p> <p>Air bersih dan sanitasi layak</p> <p>Tujuan 9</p> <p>Industri, inovasi, dan infrastruktur</p> <p>Tujuan 11</p> <p>Kota dan komunitas berkel</p>



	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	
2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Hutan Milik Desa2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa3. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Tujuan 15 Ekosistem daratan
2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	<ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)3. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
2.7. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Tujuan 7 Energi bersih dan terjangkau
2.8. Sub Bidang Pariwisata	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa3. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata	Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Tujuan 9 Industri, inovasi, dan infrastruktur

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

SUB BIDANG	KEGIATAN	SDGs
3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) 2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) 3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat <p>Lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</p>	<p>Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</p> <p>Tujuan 14 Ekosistem Daratan</p>
3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa <p>lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan</p>	<p>Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas</p> <p>Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</p>
3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa 	<p>Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur</p>

	5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa 6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga Lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	
3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1. Pembinaan Lembaga Adat 2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3. Pembinaan PKK 4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

SUB BIDANG	KEGIATAN	SDGs
4.1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 5. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) 6. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*	Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) 2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Tujuan 12

	4. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1. Peningkatan kapasitas kepala Desa 2. Peningkatan kapasitas perangkat Desa 3. Peningkatan kapasitas BPD lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa	Tujuan 16 Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 2. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*	Tujuan 4 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tujuan 5 Kesetaraan gender
4.5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM 2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 2. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*	Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
4.7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa 3. Pengembangan Industri kecil level Desa 4. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian	Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi



5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

SUB BIDANG	KEGIATAN	SDGs
5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Tujuan 1 Desa Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Desa Tanpa Kelaparan Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim Tujuan 14 Ekosistem Lautan Tujuan 15 Ekosistem daratan
5.2. Sub Bidang Keadaan Darurat	Keadaan Darurat	
5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak.	Keadaan Mendesak	



BAB VI PENUTUP

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

RPJM DESA NANJUNG MEKAR

TAHUN 2024 - 2029

6.1 KESIMPULAN

Bahwasanya keberhasilan suatu Desa ditentukan oleh bagaimana Desa ini mengawali dengan perencanaan yang baik, terstruktur dan berkesinambungan/berkelanjutan, sehingga hasil yang dicapai akan sesuai dengan yang kita harapkan. 5 (lima) bidang yang sudah ditentukan dengan semua kegiatannya yang tersusun dalam dokumen RPJM Desa semoga menjadi tolak ukur penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah Desa dan pembangunan yang ada di desa Nanjung Mekar.

Besar harapan kami bahwasanya Kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan terealisasi semua. Dokumen ini tentunya masih banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan dan penyusunan, semoga hal ini mejadi penyemangat kami dalam hal membangun Desa.

6.2 SARAN

Bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat yang ada, oleh karenanya kami mengharap kepada semua elemen masyarakat di Desa Nanjung Mekar agar:

1. Mempererat dan memperkuat kebersamaan untuk membangun Desa tercinta agar kesejahteraan masyarakat Desa Nanjung Mekar segera terwujud.
2. Membangun sebuah Desa menjadi tujuan kita bersama, menjaga dan melestarikan hasil dari pembangunan itu juga wajib kita laksanakan.
3. Bagian yang penting dalam arah pembangunan Desa, melalui saran dan kritiknya, dengah harapan bisa membawa Desa Nanjung Mekar menjadi lebih baik kedepannya.

Semoga Dokumen RPJM Desa ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

SALAM KADESA – DESA CERDAS NANJUNG MEKAR

Kepala Desa Nanjung Mekar

Kiki Kosasih, S.E.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA NANJUNG MEKAR
TAHUN 2024 - 2029



Tim Penyusun RPJM Desa Nanjung Mekar Tahun 2024 - 2029